PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugrah dan rahmat-Nya sehingga Buku Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 dapat terselesaikan dengan baik. Buku laporan ini diuraikan kedalam 6 (enam) bab, yang meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, serta Bab Penutup.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2005-2025 ini selanjutnya menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama periode tersebut.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggitahun 2005-2025 ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

TIM PENYUSUN

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

KATAPENGANTAR i

DAFTARISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB IPENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya I-7

1.4. Maksud dan Tujuan I-10

1.5. Sistematika Penulisan..... I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... II-1

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah II-2

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-13

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-26

2.1.4. Kondisi Demografi II-29

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-36

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-36

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-40

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga II-41

2.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-45

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib II-45

2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-51

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-52

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-56

2.4.3. Fokus Iklim berinvestasi II-89

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-93

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH III-1

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah III-1
3.1.1. Permasalahan Pengamalan Agama danBudaya Daerah III-3
3.1.2. Permasalahan ReformasiBirokrasidan Tata KelolaPemerintahan. III-4
3.1.3. Permasalahan SumberdayaManusia..... ..... III-8
3.1.4. Permasalahan Kemiskinan..... ..... III-14
3.1.5. Permasalahan Peningkatan Perekonomian Daerah..... III-14
3.1.6. Permasalahan Kepariwisataan..... III-17
3.1.7. Permasalahan Penyedian Infrastruktur Daerah..... III-18
3.1.8. Permasalahan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)..... III-20
3.1.9. Permasalahan Lingkungan Hidup..... III-20
3.2. IsuStrategis..... III-26
3.2.1. Faktor Strategis III-27
3.2.2. Penetapan Isu Strategis III-33

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH..... IV-1

4.1. Visi IV-1
4.2. Misi IV-3

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH..... V-1

5. 1. Arah Kebijakan Daerah V-1
5. 2. Tahapan Pembangunan Daerah dan Skala Prioritas V-4
5. 3. Sasaran Pokok V-7

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017.....	II-14
Tabel 2.2	Potensi Objek Wisata Kota Bukittinggi	II-20
Tabel 2.3	Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor	II-26
Tabel 2.4	Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi	II-35
Tabel 2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2017	II-39
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017	II-45
Tabel 2.11	Ratio Ketersediaan Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017	II-46
Tabel 2.12	Ratio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017.....	II-48
Tabel 2.17	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2017	II-52
Tabel 2.18	Distribusi PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010 s/d 2017.....	II-55
Tabel 4.1	Pentahapan Visi dan Misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025	IV-6
Tabel 5.1	Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025	V-5
Tabel 5.2	Pentahapan Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025	V-10
Tabel 5.3	KeterkaitanVisi, Misi, ArahKebijakan, dan Sasaran Pokok Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025	V-12

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar1.1	Skema Hubungan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 dengan dokumen lainnya	I- 9
Gambar 2.1	Perkembangan Proporsi Pengunaan Lahan Kota Bukittinggi Tahun 2010-1017	II- 10
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II- 13
Gambar 2.3	Proporsi Penggunaan Lahan Pertanian Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2017.....	II-14
Gambar 2.4	Komposisi Luas Area Budi daya Ikan Darat Kota Bukittinggi	II-16
Gambar 2.5	Perbandingan Rata-rata Jumlah Industri Kecil Makanan dan Minuman di Kota Bukittinggi Selama Tahun 2010 – 2017	II-17
Gambar 2.6	Jumlah Industri Kecil Sandang dan Kulit di Kota Bukittinggi	II-17
Gambar 2.7	Grafik Perkembangan Kunjungan Wisata Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017..	II-19
Gambar 2.8	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 s/d 2017	II-25
Gambar 2.9	Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Bukittinggi.....	II-28
Gambar 2.10	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017.....	II-30
Gambar 2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-31
Gambar 2.12	Proporsi Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur (dalam %).....	II-32
Gambar 2.13	Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2017.....	II-37
Gambar 2.14	Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017.....	II-38
Gambar 2.15	Perkembangan Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2017.....	II-40
Gambar 2.16	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota BukittinggiTahun 2010 – 2017.....	II-41
Gambar 2.17	PersebaranBangunan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Konstruksi.....	II-51
Gambar 2.18	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Bukittinggi	II-57
Gambar 2.19	Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Bukittinggi	II-58
Gambar 2.20	Jumlah Pasar, Toko dan Los di Kota Bukittinggi	II-59
Gambar 2.21	Rata-rata Berat Timbulan Sampah Kota Bukittinggi di TPA Regional Payakumbuh	II-60
Gambar 2.22	Jumlah dan Kapasitas Wadah Sampah Kota Bukittinggi	II-62
Gambar 2.23	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Bukittinggi	II-72
Gambar 2.24	Tingkat Pelayanan PDAM Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi	II-77
Gambar 2.25	Luas Saluran Irigasi dalam Kota Bukittinggi	II-86
Gambar 2.26	Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017.....	II-90
Gambar 2.27	Angka Krimminalitas Wilayah Hukum Polisi Resor Kota BukittinggiTahun 2010 s/d 2017	II-92
Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Manusia Kota BukittinggiTahun 2010 – 2017.....	II-94

BAB I
PENDAHULUAN

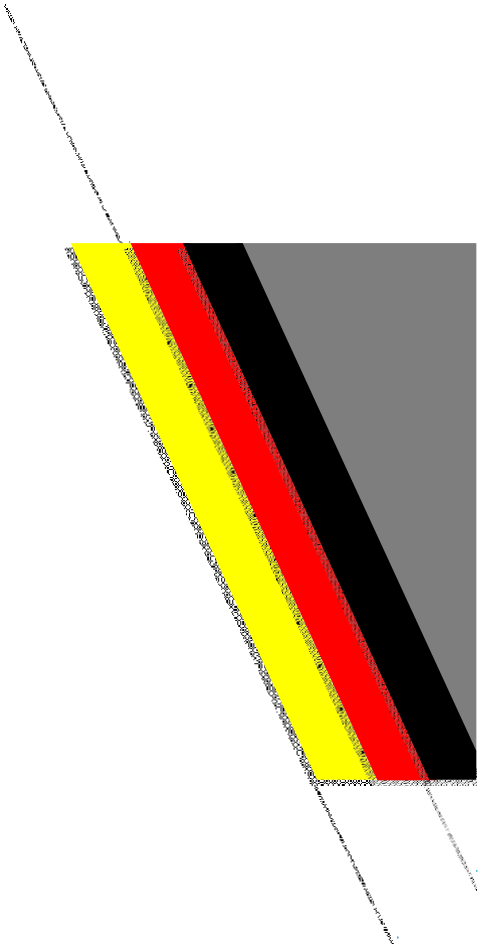

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB VI
PENUTUP

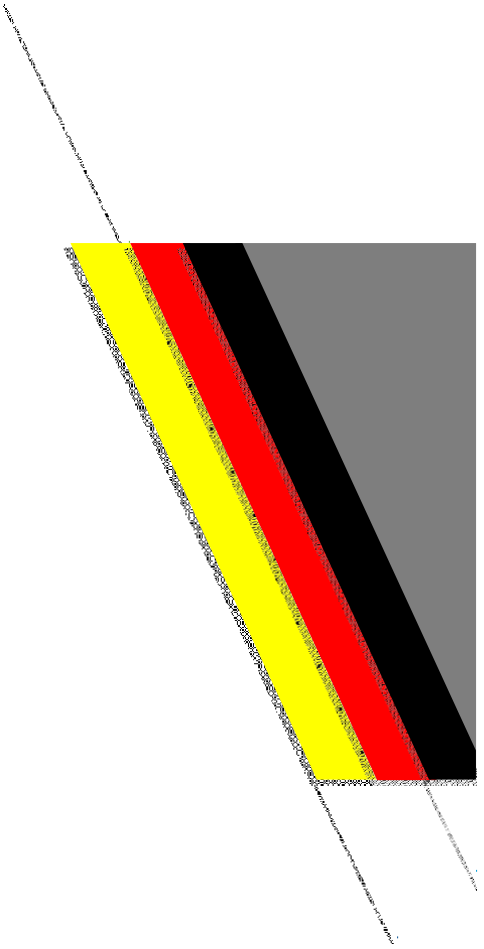

WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif dan efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Kota Bukittinggi telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 sebagai akibat dari terjadinya beberapa perubahan kebijakan nasional dan perubahan kondisi Kota Bukittinggi mengakibatkan sebahagian target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 tidak lagi relevan atau tidak selaras dengan perkembangan yang terjadi serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daearh, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 15 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen dalam daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang JPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
15. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

2. Ketentuan ayat (1) pasal 7 diubah dan ayat (2) pasal 7 dihapus, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7

(1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilakukan melalui urutan :
    1. Persiapan penyusunan;
    2. Penyusunan Rancangan Awal;
    3. Penyusunan Rancangan;

4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

(2) Dihapus

3. Ketentuan ayat (1) pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) RPJPD Tahun 2006-2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
   d. Visi dan Misi Daerah;
   e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
   f. Penutup.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Walikota bertanggungjawab menyusun dokumen dan menyelenggarakan RPJPD.

(2) Dalam menyelenggarakan RPJPD Walikota dibantu oleh Kepala Badan.

(3) Kepala Badan melakukan Evaluasi atas Penyelenggaraan RPJPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 April 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (3/27/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, telah disahkan dengan peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Namun dalam perjalanannya, terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional dan juga kondisi daerah kota bukittinggi yang menyebabkan asumsi pokok dalam perencanan pembangunan jangka panjang tersebut juga harus berubah. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 pada tahun 2017 yang lalu perlu dilakukan perubahan atas RPJPD Kota Bukittinggi agar rencana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan juga perubahan kondisi daerah.

Selain itu pemerintah juga harus mencapai target pembangunan secara internasional seperti target *sustainable development goals* (SDGs), pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pengendalian pemanasan global (*global warming*) melalui program menghilangkan gas karbondioksida dan mengurangi produksi gas rumah kaca yang ditetapkan setelah tahun 2015. Perubahan-perubahan faktor eksternal yang demikian cepat dipastikan belum terakomodasi pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025.

Selanjutnya perubahan lingkungan eksternal mengakibatkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 tidak lagi relevan atau tidak selaras dengan perkembangan yang terjadi selama 13 tahun terakhir. Selain terdapat ketidakselarasan arah pembangunan dengan perubahan yang terjadi juga tidak dapat dipungkiri bahwa pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 masih belum terdapat penetapan target. Berdasarkan dua aspek yang dikemukakan ini, RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 dapat menjadi tertinggal karena akselerasi pembangunan yang terjadi selama 13 tahun terakhir.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025. Adapun substansi perubahan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 diantaranya adalah:

A. Penjelasan tentang keterkaitan rpjpd dengan dokumen perencanaan lainya seperti RPJPN, RPJPD Propinsi, RPJP kab/kota sekitar,
B. Penyempurnaan terhadap gambaran kondisi umum daerah (kondisi kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah)
C. Penyempurnaan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis, dimana pada RPJPD sebelumnya tidak terdapat isu strategis, pada perubahan RPJPD ini telah diidentifikasi isu strategis berdasarkan hasil forum konsultasi publik dan *focus group discussion* sebagai berikut :
    1. Penerapan abs-sbk dan pemberdayaan masyarakat;
    2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
    3. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi;
    4. Peningkatan lingkungan hidup;
    5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan;
    6. Pembangunan kependudukan;
    7. Pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
    8. Penanggulangan kemiskinan.

D. Penetapan target dan sasaran kinerja

    Pada RPJPD perubahan terdapat sasaran kinerja yaitu :

    1. Meningkatnya penerapan pendidikan berkarakter di kota bukittinggi
    2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota bukittinggi
    3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
    4. Meningkatnya pemerataan ekonomi
    5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan
    6. Pengembangan sektor pariwisata
    7. Mewujudkan bukittinggi sebagai kota pusaka dunia yang ramah lingkungan
    8. Meningkatnya penyediaan infrastruktur kota yang ramah lingkungan

9. Meningkatnya penyelenggaraan penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

E. Penyempurnaan arah kebijakan dan, meliputi penyempurnaan terhadap arah kebijakan pada RPJPD lama yang disempurnakan berdasarkan hasil musrenbang dan telaahan klhs yaitu :
   1. Mewujudkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat;
   2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;
   3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas;
   4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan pemerataan pendapatan;
   5. Mewujudkan kota bukittinggi sebagai kota wisata yang berbudaya dan ramah lingkungan;
   6. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan berwawasan lingkungan dan budaya lokal;
   7. Penataan dan pengaturan tata ruang wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
   8. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Perubahan RPJPD ini telah disertai dengan telaahan terhadap lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bertujuan untuk menjamin konsep pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi kedalam dokumen perubahan RPJPD ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisikan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 20 Tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Namun dalam perjalanannya, terjadi beberapa perubahan kebijakan Nasional dan juga kondisi internal daerah Kota Bukittinggi yang menyebabkan asumsi pokok dalam perencanan pembangunan jangka panjang tersebut juga berubah.

Meskipun Kota Bukittinggi pada saat ini telah mengalami banyak kemajuan, harus pula disadari bahwa telah banyak terjadi perubahan di lingkungan eksternal yang tidak diperkirakan atau diprediksi saat penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 pada tahun 2006. Perubahan faktor eksternal yang paling

mendasar adalah target pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pengendalian pemanasan global (*global warming*) melalui program menghilangkan gas karbondioksida dan mengurangi produksi gas rumah kaca sebagai lanjutan dari *Millenium Development Goals (*MDGs*)* yang telah berakhir pada Tahun 2015. Perubahan-perubahan faktor eksternal yang demikian cepat dipastikan belum terakomodir pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025.

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan kebijakan Nasional terutama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, membawa implikasi pada perubahan sistematika penulisan dan penyempurnaan substansi pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi.

Pada dokumen RPJPD Kota Bukittinggi yang dibuat pada tahun 2006 terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah

belum lengkapnya gambaran umum kondisi daerah, belum terakomodirnya permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, belum adanya penetapan target dan sasaran kinerja, serta perlunya penajaman terhadap arah kebijakan daerah. Terkait dengan gambaran umum kondisi umum daerah perlu disesuaikan dengan dokumen perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdampak terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, di antaranya pengalihan sebagian kewenangan ke Pemerintah Provinsi seperti pendidikan menengah dan terminal tipe B yang tentunya belum diakomodir pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 yang lalu perlu dilakukan perubahan atas RPJPD Kota Bukittinggi agar rencana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan juga kondisi daerah.

Adapun substansi perubahan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diantaranya adalah:

a. Penjelasan tentang keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainya seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kota Bukittinggi dan RPJPD Kabupaten sekitar.
b. Penyempurnaan terhadap Gambaran Kondisi Umum Daerah
c. Penyempurnaan terhadap Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
d. Penyempurnaan terhadap Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4565);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

m. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainya

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD).

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu yang sama, selanjutnya Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi ini disusun

dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030, dan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam.

Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi ini merupakan dasar bagi penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi selama 4 tahap, dengan masing-masing periode terdiri dari 5 tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih. Secara skematis hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1.
Skema Hubungan RPJPD Kota Bukittinggi 2005-2025 dengan Dokumen Lainnya

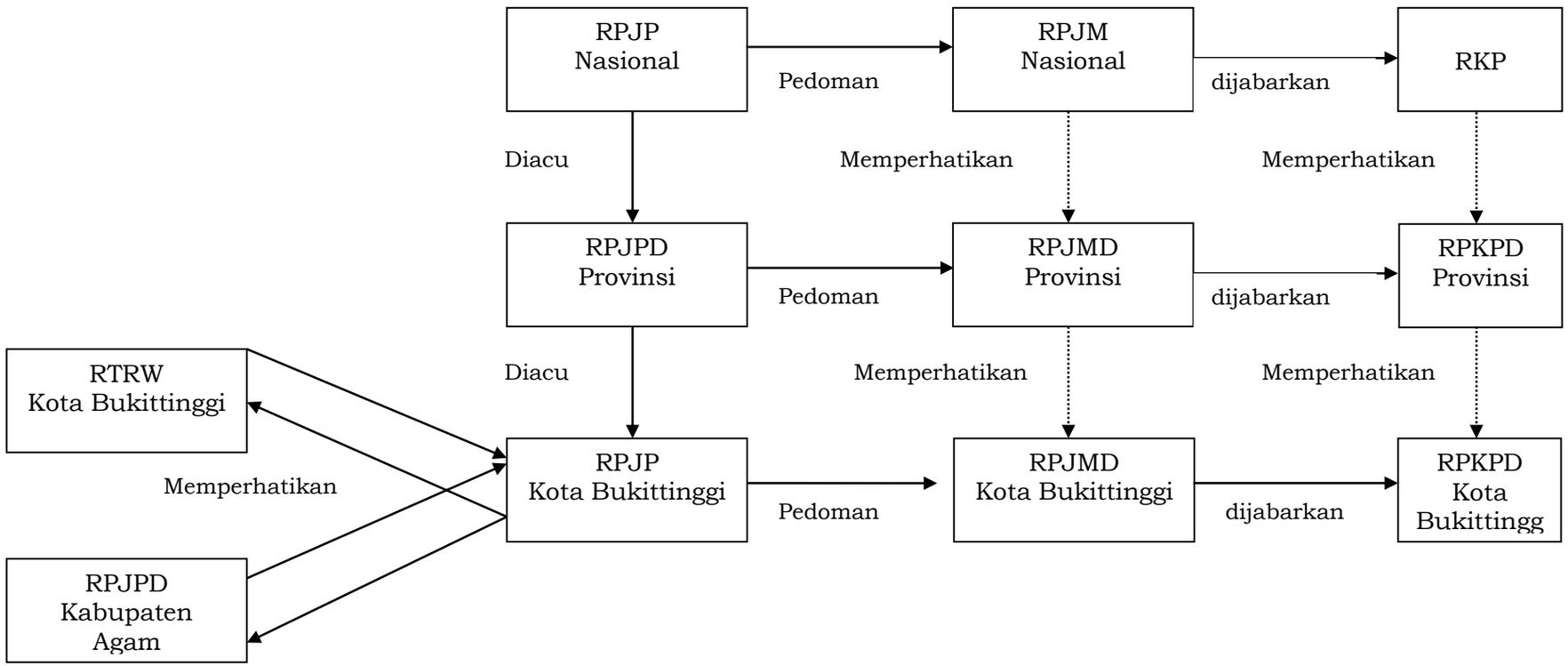

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Secara umum penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan didirikanya Kota Bukittinggi sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Sementara itu, tujuan dilaksanakannya Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi berdasarkan hasil evaluasi terhadap RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu, adalah :

a. penyempurnaan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkembang sesuai dengan dinamika pembangunan;
b. penetapan target dan sasaran kinerja RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025;
c. penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur; dan
d. penetapan sasaran pokok dan arah kebijakan serta penahapan yang dilakukan dalam rangka mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi.

1.5. Sistematika Penulisan

1. BAB I. PENDAHULUAN
    1.1. Latar Belakang
    1.2. Dasar Hukum
    1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
    1.4. Maksud dan Tujuan
    1.5. Sistematika Penulisan
2. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
    2.1. Aspek Geografi dan Demografi
    2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    2.3. Aspek Pelayanan Umum
    2.4. Aspek Daya Saing Daerah
3. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
    3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
    3.2. Isu Strategis
4. BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH
    4.1. Visi
    4.2. Misi
5. BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
    5.1. Arah Kebijakan Daerah
    5.2. Sasaran pokok
6. BAB VI. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Periode 2005-2025 disusun sedemikian rupa atas dasar beberapa pertimbangan penting. Pertimbangan pertama adalah bahwa penyusunan rumusan strategi dilakukan atas dasar hasil analisis potensi pembangunan yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi. Potensi yang akan dianalisis menyangkut dengan kondisi umum daerah, yang berkaitan dengan aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Pertimbangan kedua adalah dengan memahami faktor strategis yang dimiliki, baik yang bersifat internal maupun eksternal serta prediksi kuantitatif kondisi umum daerah. Kedua pertimbangan ini dijadikan dasar untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan kondisi umum daerah terkait kondisi geografis daerah, potensi pengembangan wilayah dan kondisi demografis daerah yang bertujuan sebagai landasan dalam menemukan permasalahan pembangunan.

2.1.1. Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1. Letak, Luas dan batas Wilayah

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak pada bagian tengah Propinsi Sumatera Barat $100^{0}21$ – $100^{0}25$ Bujur Timur dan $00^{0}16$ – $00^{0}20$ Lintang Selatan dengan ketinggian sekitar 780–950 meter dari permukaan laut. Luas wilayah lebih kurang 25,23 Km^2 dengan batas administrasi yaitu:

Utara : Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

Selatan : Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

Barat : Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam

Timur : Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terbentuk dari tufa batuapung sehingga tanahnya subur. Namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa. Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan dan ngarai.

Ngarai berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di kawasan Gulai

Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian Barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian Barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian Tengah dan Timur.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Kota Bukittinggi memiliki iklim yang termasuk kategori tropis basah, dengan temperatur udara berkisar antara 16,1^0 C sampai dengan 24,9^0 C, sementara kelembaban udara berkisar antara 82,0% sampai dengan 90,8% dan tekanan udara berkisar 22.C sampai dengan 25.C

2.1.1.4. Kondisi Geologi

a. Batuan

Ground Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (*exposed*), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunung apian (volkanisme).

b. Tanah

Wilayah Kota Bukittinggi, terdiri dari dua jenis tanah, yaitu

1) tanah endapan : terdapat di dasar ngarai sepanjang alur

Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (aluvium) dan oleh longsoran tebing (koluvium).

2) tanah residu : terdapat di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman).

c. Struktur geologi

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Lembah yang berderet paralel dengan barisan bukit-bukit sepanjang tengah Pulau deretan lembah mulai dari Muara Labuh, terus ke Gumanti dan Solok terus ke Marapi, terus ke Palupuh dan Rao di Pasaman Timur. Kota Bukittinggi, terletak 1250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera.

d. Resiko Gempa Bumi

Kota Bukittinggi, meskipun terletak di luar jalur sesar aktif,

namun akan menerima perambatan getaran seismik jika terjadi gempa bumi yang berhiposentrum pada jalur sesar tersebut. Pada peta gempa bumi Indonesia, kota Bukittinggi termasuk ke dalam wilayah 5, yaitu wilayah yang menerima getaran gempa bumi dengan percepatan rambatan permukaan sebesar 0,25 g. Gempa Bumi pernah mencapai Kota Bukittinggi dengan kekuatan VI s/d VII MMI atau setara dengan 6 s/d 6,5 Skala Richter (SR).

e. Resiko Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan aspek hidrogeomorfologi, zona berpotensi longsor di Kota Bukittinggi termasuk Tipologi B, karena pada elevasi 750 m s/d 950 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan lereng 21% s.d 40%. Namun, distribusi kemiringan lereng tidak seragam, maka Tipologi B ini hanya untuk jalur di sepanjang Ngarai Sianok yang memenuhi syarat kemiringan lereng terjal. Sementara tingkat kerawanan terjadinya gerakan tanah di wilayah Kota Bukittinggi terkategori sedang.

f. Resiko Gunung Api

Kota Bukittinggi terletak 15 kilometer di barat laut Kepundan Bungsu di puncak gunung aktif Marapi. Puncak Marapi, tidaklah runcing mengerucut, tapi tumpul dengan arah memanjang timur-barat 1500meter, dengan lebar 500 meter. Pada puncak Marapi terdapat 5 lubang kepundan (kawah) dengan diameter beragam. Terbesar ialah Kepundan Bungsu berdiameter

200 meter kedalaman puluhan meter. Lainnya Kepundan Bungo, Kepundan Tuo, Kepundan Jinggo dan Kepundan Kuniang. Rekam jejak kegiatan (erupsi) Marapi menujukkan bahwa kegiatan kawah berganti-ganti di antara Kepundan Bungo di Timur dan Kepundan Bungsu di barat. Abu hasil Marapi, paling kerap jatuh di Kota Padang Panjang, di barat daya puncak Gunung Marapi. Pernah juga abu dari erupsi Marapi, menyelimuti Batusangkar di timur puncak marapi. Kearah barat laut, ke Bukittinggi jarang terjadi jatuhan abu. Meskipun demikian, beberapa alur sungai dari lereng utara Marapi, sebagian ada yang termasuk area Kota Bukittinggi. Bahaya lahar dingin (galodo) ke Bukittinggi masih dapat terjadi jika hujan lebat disertai erupsi Marapi melalui Kepundan Bungsu. Namun lahar dingin itu sebelum tiba di Bukittinggi terlebih dahulu akan melanda area Kabupaten Agam. dengan demikian, Kota Bukittinggi merupakan kawasan rawan letusan gunung api dengan tipologi A yaitu resiko rendah.

g. Ngarai Sianok

Ngarai Sianok merupakan kawasan yang patut mendapatkan perhatian lebih, mengingat kerawanan terhadap longsor, gempa bumi dan kepadatan penduduk. Longsor di sepanjang tebing Ngarai Sianok, bukanlah wacana atau sekedar prediksi yang belum terjadi, namun telah berulang kali menjadi peristiwa aktual di masa silam.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur.

Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai. Sungai-sungai yang relatif besar di Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- Batang Sianok dengan lebar 12 meter.
- Batang Tambuo dengan lebar 7 meter.
- Batang Agam dengan lebar 6 meter.

Kota Bukittinggi dilewati oleh Batang Tambuo dan Batang Sianok. Batang Tambuo memiliki lebar lembah 7 meter dan melalui Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Sedangkan Batang Sianok memiliki lebar lembah yang lebih besar yaitu 12 meter dan melewati Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk Panjang.

Kemudian terdapat beberapa sungai yang tidak secara langsung mengalir dalam wilayah Kota Bukittinggi tetapi masih dalam

lingkup WAS Masanghulu dan Batang Agam, yaitu :

- Sungai Batang Air Katiak.
- Sungai Batang Serasah.
- Sungai Batang Agam.

Kecuali berfungsi sebagai outlet hidrologi kawasan, sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier.

Untuk pengembangan wilayah di sekitar sungai perlu memperhatikan garis sempadan sungai. Pembangunan hanya ilegal dilakukan di luar garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai ini adalah 100 meter dari garis pasang terluar. Untuk lebih jelasnya panjang garis sempadan sungai di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (*up stream*) dengan pola Dendritik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

Permunculan air tanah (mata air) yang berasal dari satuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki Gunung Singgalang dan

Gunung Marapi, yaitu di daerah dataran timur laut Kota Bukittinggi, di antaranya mata air Sungai Tanang (150 liter/detik) dan mata air Bulan Gadang (150 liter/detik).

Karakter air tanah wilayah Bukittinggi mengacu kepada peta Hidrologi lembar Padang, Sumatera Barat yang dipublikasi oleh Direktorat Tata Lingkungan, menjelaskan bahwa Aquifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan tekanan batuan/tanah. Potensi air tanah termasuk dalam klasifikasi sedang sampai tinggi. Tingkat serahan air tanah dapat mencapai 5 – 10 liter/detik. Kedalaman air tanah dangkal lebih kurang 3 meter, sedangkan air tanah dalam/artesis mencapai kedalaman 100 meter.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Perkembangan suatu kota dapat terlihat dari perubahan penggunaan lahannya. Dari data penggunaan lahan dapat terlihat berapa luas lahan yang telah dimanfaatkan dan berapa lahan yang tersisa yang belum dimanfaatkan baik untuk lahan pertanian maupun lahan terbangun lainnya. Penggunaan lahan di Kota Bukittinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik perkembangan penggunaan lahan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Perkembangan Proporsi Penggunaan Lahan Kota Bukittinggi
Tahun 2010-2017

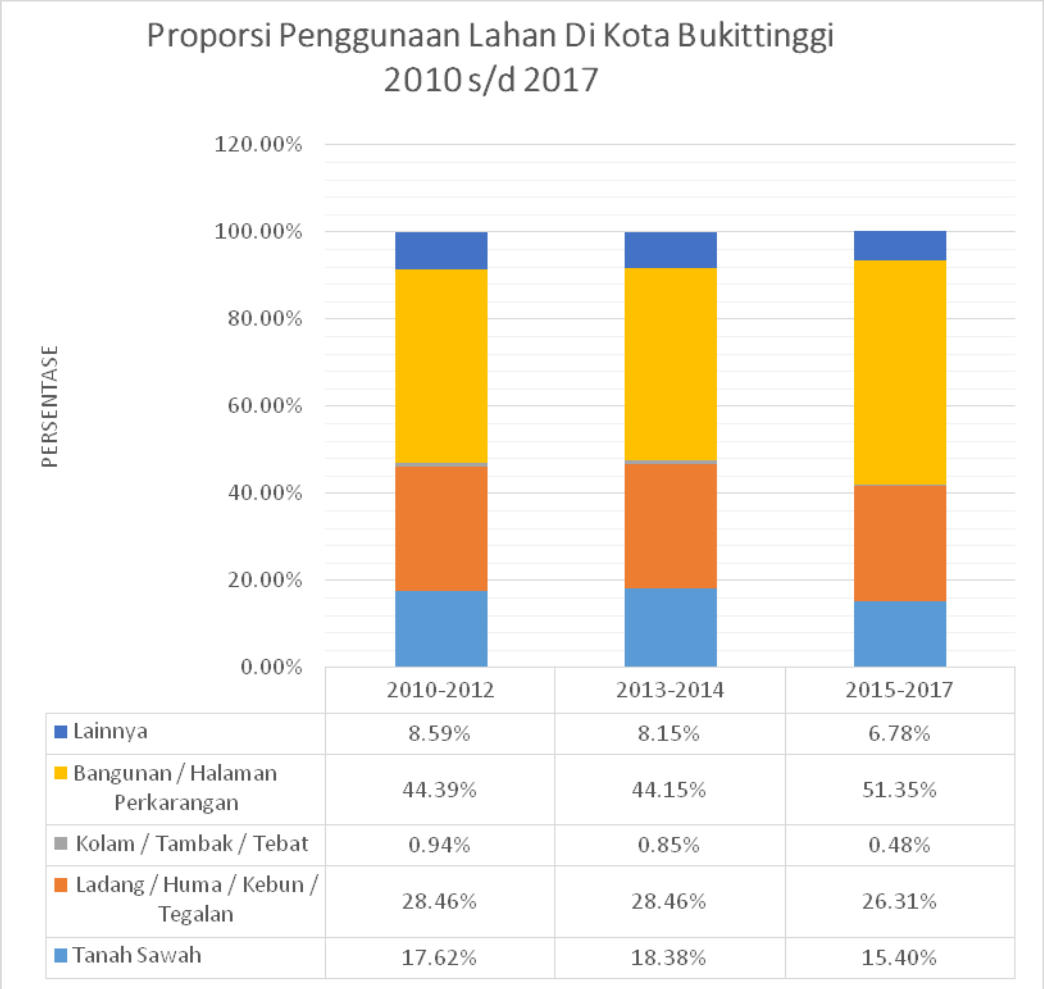

	2010-2012	2013-2014	2015-2017
Lainnya	8.59%	8.15%	6.78%
Bangunan / Halaman Perkarangan	44.39%	44.15%	51.35%
Kolam / Tambak / Tebat	0.94%	0.85%	0.48%
Ladang / Huma / Kebun / Tegalan	28.46%	28.46%	26.31%
Tanah Sawah	17.62%	18.38%	15.40%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan data Gambar di atas pada Tahun 2010-2011 Proporsi lahan yang digunakan sebagai bangunan adalah sebanyak 44,39%, kemudian menjadi 51,35% pada tahun 2015-2017, sedangkan Proporsi untuk penggunaan tanah sawah, ladang dan lainnya terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan/halaman pekarangan di Kota Bukittinggi selama 8 Tahun terakhir.

2.1.1.7. Kondisi Geografis Lainnya

Berdasarkan luas wilayah, Kota Bukittinggi dapat dikategorikan sebagai Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan dan kepulauan.

Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Di samping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Kondisi demikian menyebabkan Kota Bukittinggi yang mempunyai hawa yang sejuk berpotensi sangat besar sebagai daerah wisata dan peristirahatan utama dalam Provinsi Sumatera Barat.

Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km^2 (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang

meliputi 7 kelurahan.

2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km^2 (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km^2 (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Di samping luas wilayah relatif kecil, daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman juga terbatas karena adanya perbukitan dan jurang (ngarai) yang cukup dalam. Sementara itu perkembangan kota dan pertambahan penduduk dalam beberapa tahun terakhir ternyata cukup pesat.

Dari aspek lingkungan hidup, Kota Bukittinggi ditandai dengan semakin padatnya jumlah penduduk. Kondisi ini berdampak kepada daya dukung kota, sehingga perlu disesuaikan melalui upaya rekayasa lingkungan, baik perumahan, pasar, maupun fasilitas umum. Termasuk di antaranya kualitas udara, saluran pembuangan sampah dan tingkah laku masyarakat dalam memelihara lingkungan. Sejalan dengan hal itu perlu pula dilakukan penataan yang terkait yang terkait dengan jalur lalu lintas guna mengurangi kemacetan, baik lalu lintas kendaraan bermotor maupun kendaraan yang ditarik dengan hewan, roda dua, kendaraan roda empat kecil maupun besar. Upaya untuk

mengatasi persoalan sampah adalah sangat sinkron bilamana dikaitkan dengan kebutuhan warga untuk hidup sehat dan menikmati indahnya kota.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi dengan luas 25,23 Km², daerah yang efektif untuk dibangun hanya sekitar 18 Km². Hal ini disebabkan karena kondisi kota yang berbukit dan memiliki jurang atau yang lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi Geografi dalam pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

Rumusan potensi pengembangan wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografi daerah. Karena dengan memperhatikan kondisi geografi daerah dapat diketahui sejauh mana potensi suatu wilayah dapat dikembangkan. Untuk lebih jelasnya pada Gambar 2.1 berikut dapat dilihat bagaimana kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan wilayah.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

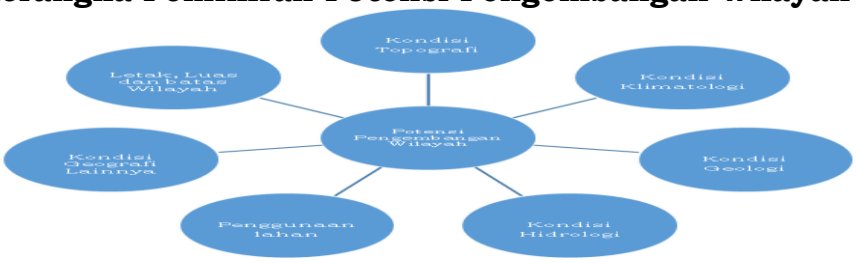

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.2.1. Sektor Pertanian

Kota Bukittinggi memang bukan kota yang berkembang dengan orientasi utama pada sektor pertanian. Meskipun demikian sektor pertanian masih terus berkembang dan tetap dikembangkan di Kota Bukittinggi khususnya tanaman padi. Lahan pertanian dikembangkan untuk berbagai macam tanaman dengan penggunaan lahan terbesar adalah untuk lahan pertanian sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.3
Proporsi Penggunaan Lahan Pertanian
Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2017

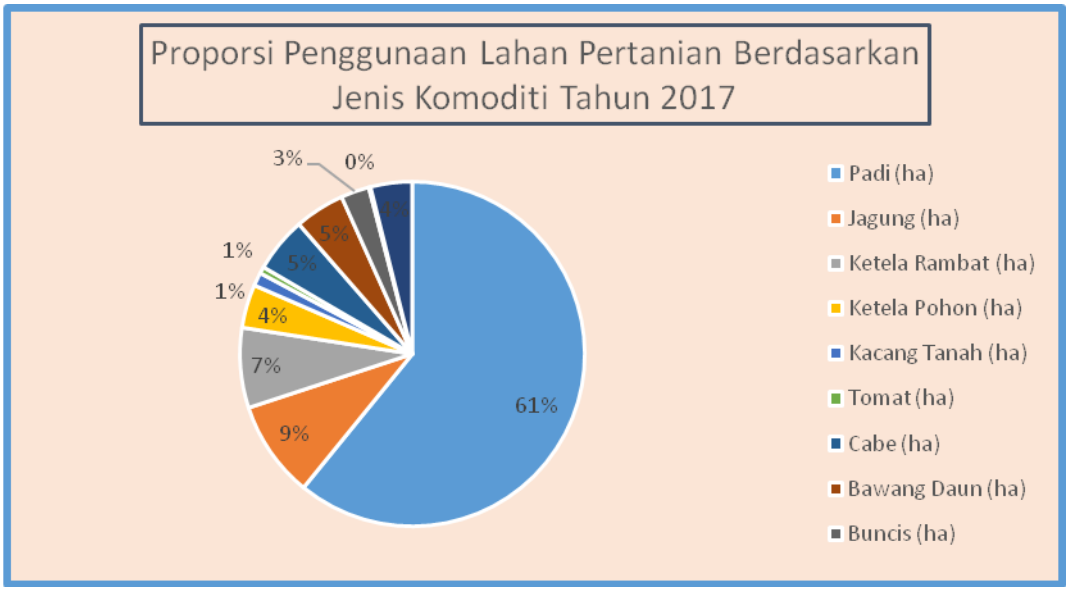

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas. Di kecamatan ini terdapat budidaya seluruh komoditi, dengan lahan pertanian terluas tanaman padi, yakni 191 ha.

2.1.2.2. Sektor peternakan

Sektor peternakan yang mendominasi di Kota Bukittinggi adalah peternakan ayam ras. Sedangkan untuk ternak lainnya seperti sapi, kerbau, kambing dan kuda jumlahnya masih relatif kecil. Dari tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi jumlah ternak yang paling banyak terdapat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Jumlah Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017

No	Jenis Ternak	Kecamatan			Jumlah
		Guguk Panjang	Mandiangin Koto Selayan	Aur Birugo Tigo Baleh	
1	Sapi	134	237	102	473
2	Kerbau	22	36	18	76
3	Kambing	99	170	90	359
4	Kuda	19	195	13	227
5	Ayam Kampung	1.337	3.230	2.801	7.368
6	Ayam Ras	1.250	3.593	665	5.508
7	Itik	334	1.736	1.381	3.451
8	Puyuh	160	22	40	222

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, Tahun 2018

2.1.2.3. Sektor Perikanan

Tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian, perikanan bukanlah merupakan sektor unggulan di Kota Bukittinggi, namun demikian data menunjukkan setidaknya terdapat 345 petani ikan darat di Kota Bukittinggi yang tersebar di tiga kecamatan (Bukittinggi

dalam angka Tahun 2017). Keseluruh petani ikan darat yang ada menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sambilan bukan mata pencaharian utama keluarga. Bentuk budidaya ikan darat di Kota Bukittinggi adalah di kolam, sawah, dan sungai, namun untuk budidaya di sawah luasnya sangat kecil, yakni hanya 1,5 ha. Luas lahan budidaya ikan darat di Kota Bukittinggi keseluruhan adalah 131,36 ha, dengan komposisi sebagai berikut :

Gambar 2.4
Komposisi Luas Area Budidaya Ikan Darat Kota Bukittinggi

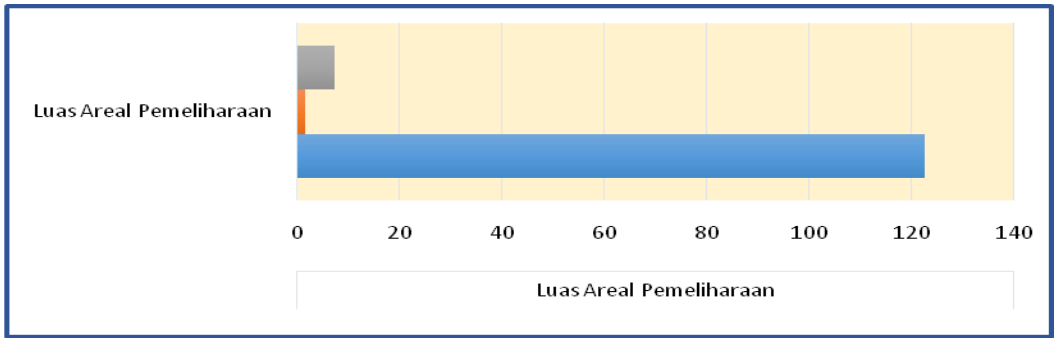

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Tahun 2017

2.1.2.4. Sektor Perindustrian

Jenis Industri yang banyak berkembang di Kota Bukittinggi adalah industri kecil dan sedang, hal ini sesuai dengan keterbatasan luas wilayah yang dapat dikembangkan. Pada tahun 2017 jumlah industri yang ada adalah 1.930 unit yang tersebar di tiga kecamatan. Industri yang ada dikelompokkan menjadi empat kategori yakni industri kecil makanan dan minuman, industri kecil sandang dan kulit, industri kecil lainnya dan industri kecil logam, barang kimia dan kerajinan lainnya. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.5
Perbandingan Rata-rata Jumlah Industri Kecil Makanan dan Minuman di Kota Bukittinggi selama 2010-2017

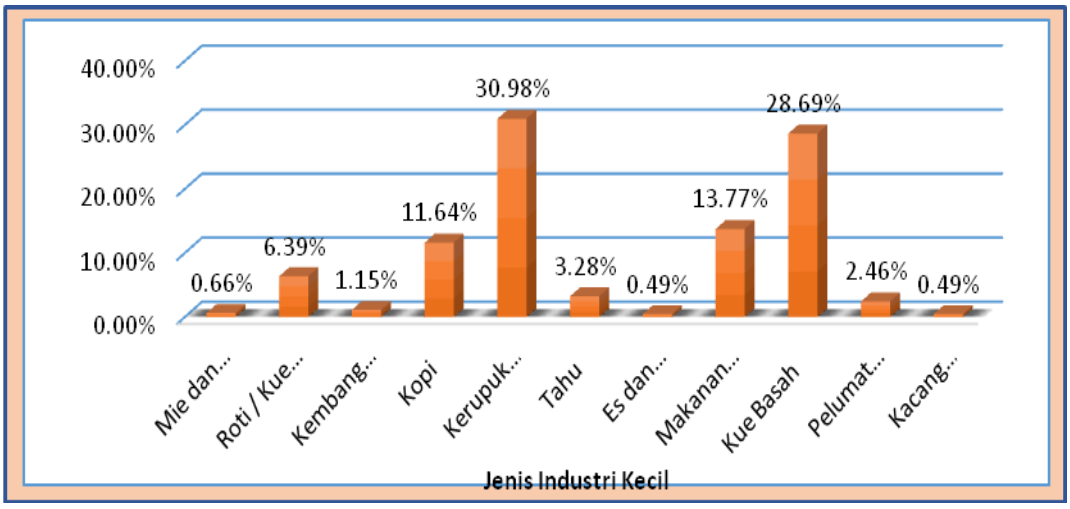

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2017

Untuk kelompok industri kecil makanan dan minuman, jumlah terbanyak adalah pada industri kerupuk, kue basah dan makanan ringan, sementara untuk kelompok industri kecil sandang dan kulit yang paling banyak adalah industri pakaian jadi dan bordir/sulaman.

Gambar 2.6
Jumlah Industri Kecil Sandang dan Kulit di Kota Bukittinggi

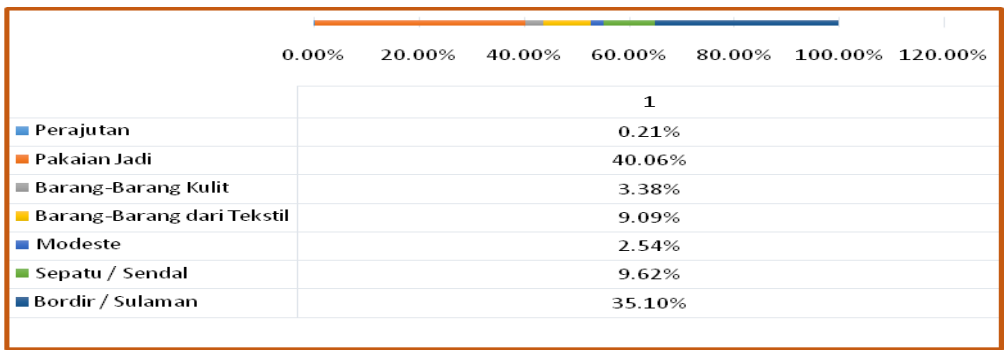

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Tahun 2017

2.1.2.5. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor terpenting dalam perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi paling besar pada PAD Kota Bukittinggi. Oleh karena itu perkembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kepariwisataan sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota. Salah satu indikator adalah dengan kontribusi sektor-sektor pendukung pariwisata dalam pengembangan Kota Bukittinggi, yaitu sektor-sektor jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, serta perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor-sektor pendukung pariwisata kota tersebut adalah sebagai berikut: sektor perdagangan, hotel dan restoran (20,71%), sektor pengangkutan dan komunikasi (23,08%) serta sektor jasa-jasa (12,93%). Hal tersebut menandakan bahwa pengembangan kawasan perencanaan harus mengakomodasikan kegiatan kepariwisataan sehingga akan mendukung agar kepariwisataan Kota Bukittinggi tetap eksis.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Namun peningkatan kunjungan lebih pesat pada kategori wisatawan domestik dibandingkan wisatawan mancanegara. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka mempromosikan Pariwisata Bukittinggi ke level International. Lebih jelasnya perkembangan jumlah wisatawan yang menjadikan Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisatanya dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 2.7
Grafik Perkembangan Kunjungan Wisata Kota Bukittinggi
Tahun 2010-2017

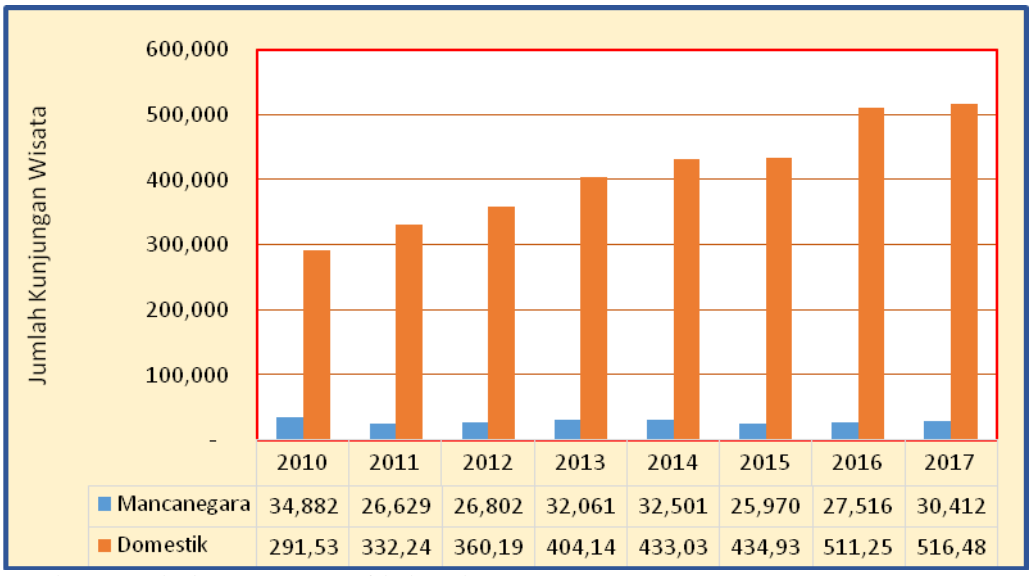

Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, 2018

Gambaran potensi Kunjungan wisata yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan tentunya harus diselaraskan dengan potensi Objek wisata yang harus ditingkatkan pula baik dari segi kualitas pelayanan maupun pengembangan objek wisata baru yang adaptif terhadap potensi sumberdaya yang ada, sehingga dapat menciptakan konsep pengembangan ruang yang sesuai dan akomodatif terhadap pengembangan pariwisata. Gambaran potensi supply pariwisata dapat diketahui dari potensi objek wisata serta

berbagai fasilitas pendukungnya.

Tabel 2.2
Potensi Objek Wisata Kota Bukittinggi

No	Objek	Lokasi	Daya Tarik
1	Taman Panorama	Terdapat di pinggir Jl. Panorama pusat kota	Pemandangan yang indah terutama Ngarai Sianok dengan latar belakang Gunung Singgalang
2	Lubang Jepang	Berlokasi di dalam Taman Panorama	Panjang ± 1400 meter berkelok-kelok dengan lebar ± 2 meter
3	Ngarai Sianok	Berlokasi di Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang yang terdapat di pinggir Kota Bukittinggi yang memisahkan Bukittinggi dengan Gunung Singgalang	Ngarai Sianok merupakan suatu lembah yang indah, hijau dan subur. Di dasarnya mengalir sungai yang berliku-liku menelusuri celah-celah tebing yang berwarna warni
4	Panorama Baru	Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Pemandangan alam yang indah ke arah Ngarai Sianok dilatarbelakangi oleh Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago.
5	Janjang Seribu	Kelurahan Bukit Apit Puhun	Lintasan jalan kaki menuruni dan menaiki tebing Ngarai Sianok. Pemandangan ke Gunung Marapi dan Singgalang dari tempat peristirahatan.
6	Kolam Renang Bantola	Jl. Dr. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang	Kolam renang untuk rekreasi
7	Jembatan Limpapeh	Jl. A. Yani	Jembatan ini melintasi Jalan A. Yani yang menhubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan Benteng Fort De Kock
8	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Sejarah hidup Bung Hatta.
9	Istana Bung Hatta	Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang	Istana bersejarah
10	Tugu Pahlawan Tak Dikenal	Lokasi Taman Lenggogeni	Monumen bersejarah
11	Monumen Bung Hatta	Bagian dari Istana Bung Hatta	Objek pendukung istana Bung Hatta

12	Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Bukit Gulai Bancah	Sarana pendidikan dan pengetahuan
13	Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan	Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang	Kebun Binatang tertua di Indonesia, Rumah Adat Baanjuang.
14	Benteng Fort De Kock	Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang	Benteng sebagai monumen sejarah dibangun tahun 1825 pada waktu perlawanan tuanku Imam Bonjol dan Harimau yang Selapan. Taman tempat rekreasi dan pesta taman terbuka hijau. Pemandangan yang indah ke arah Ngarai dan Gunung Singgalang dan Marapi. Di sini juga terdapat Reservoar air yang dibangun tahun 1972
15	Jam Gadang	Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang	Landmark dan lambang Kota Bukittinggi, dari puncak menara dapat menikmati alam sekitar Bukittinggi yang dihiasi Gunung Marapi, Singgalang, Sago dan Ngarai Sianok
16	Museum Tridaya Eka Dharma	Jl. Panorama	Informasi dan komunikasi antar generasi mewariskan nilai-nilai juang 45
17	Museum Rumah Adat Nan Baanjuang	Berada dalam Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Jl. Cindua Mato	Di dalam rumah adat ini terdapat peninggalan lama (barang-barang kuno) yang merupakan ciri khas budaya minangkabau
18	Taman Nagarai Maram	Kawasan ini berada di Kel. Kayu Kubu, tepatnya di belakang RSU Ahmad Muhtar	Adanya medan nan bapaneh, kemudian terdapat areal bermain anak. Dari taman ini kita dapat menikmati keindahan alam ngarai

Sumber: Dokumen Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030

Potensi objek wisata Kota Bukittinggi didukung pula oleh fasilitas-fasilitas pendukung wisata sehingga membentuk satu paket potensi supply pariwisata kota untuk diselaraskan dengan demand yang ada sebagai dasar pertimbangan pengembangan ruang kawasan yang akomodatif terhadap pengembangan kepariwisataan.

Karakteristik sarana perbelanjaan pendukung pariwisata yang ada diuraikan sebagai berikut:

- Pasar Atas merupakan sarana pendukung wisata belanja yang menyediakan barang-barang kerajinan sulaman, bordir dan kerajinan tangan lainnya yang menjadi ciri khas Kota Bukittinggi.
- Pasar Bawah merupakan pusat penjualan bahan makanan, dimana dapat ditemui suasana perbelanjaan khas tradisional di Pasar Minangkabau.
- Jalan Lereng terletak di antara Pasar Atas dan Pasar Bawah. Kondisi sirkulasi dan tangga penghubung terhambat oleh keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan hampir seluruh ruas jalan dan jenjang yang ada di Jalan Lereng tersebut. Secara estetika, Jalan Lereng kurang memiliki nuansa yang mendukung kenyamanan sehingga perlu dilakukan revitalisasi untuk meningkatkan kualitas Jalan Lereng.
- Pasar Banto merupakan area yang menarik karena merupakan titik pertemuan dari tiga poros kota. Akan tetapi jenis komoditi yang dipasarkan kurang menunjang potensi lokasinya. Pada malam hari kawasan di sekitar Pasar Banto menjadi tempat penjualan makanan.

- Pasar Simpang Aur Kuning berada di bagian timur Kota Bukittinggi yang dibangun pada tahun 1985. Pasar ini berfungsi sebagai pasar konveksi dengan perdagangan skala besar (grosir) dan beberapa skala kecil (eceran).

2.1.2.6. Sektor Perdagangan dan Jasa

Secara regional, Kota Bukittinggi merupakan pusat ekonomi bagi wilayah hinterland-nya, dalam hal ini wilayah Kabupaten Agam. Karakteristik ekonomi Kota Bukittinggi tercermin dari dominasi kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bukittinggi, yang menjadi orientasi bagi wilayah hinterland-nya. Dalam hal ini Kota Bukittinggi berperan sebagai pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa bagi wilayah di Kota Bukittinggi itu sendiri maupun wilayah regionalnya.

Perekonomian Kota Bukittinggi pada periode tahun 2010-2017 didominasi dua sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bukittinggi, yaitu pertama sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai PDRB Rp. 1.042.360 Milyar pada tahun 2010 kemudian meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.524.057 Milyar, Kontribusi terbesar kedua adalah transportasi dan pergudangan yaitu sebesar Rp. 361.513 Milyar pada tahun 2010, menjadi Rp. 799.519 Milyar pada tahun 2017, keemudian disusul oleh sektor Konstruksi, Industri pengolahan, informasi dan komunikasi.

Secara umum hampir semua sektor mengalami peningkatan PDRB dalam periode 2010-2017, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak berkembang, serta sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan tidak berarti. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan PDRB Kota Bukittinggi menurut lapangan usaha atas harga berlaku tahun 2010 – 2017 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.8
PRRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 s/d 2017

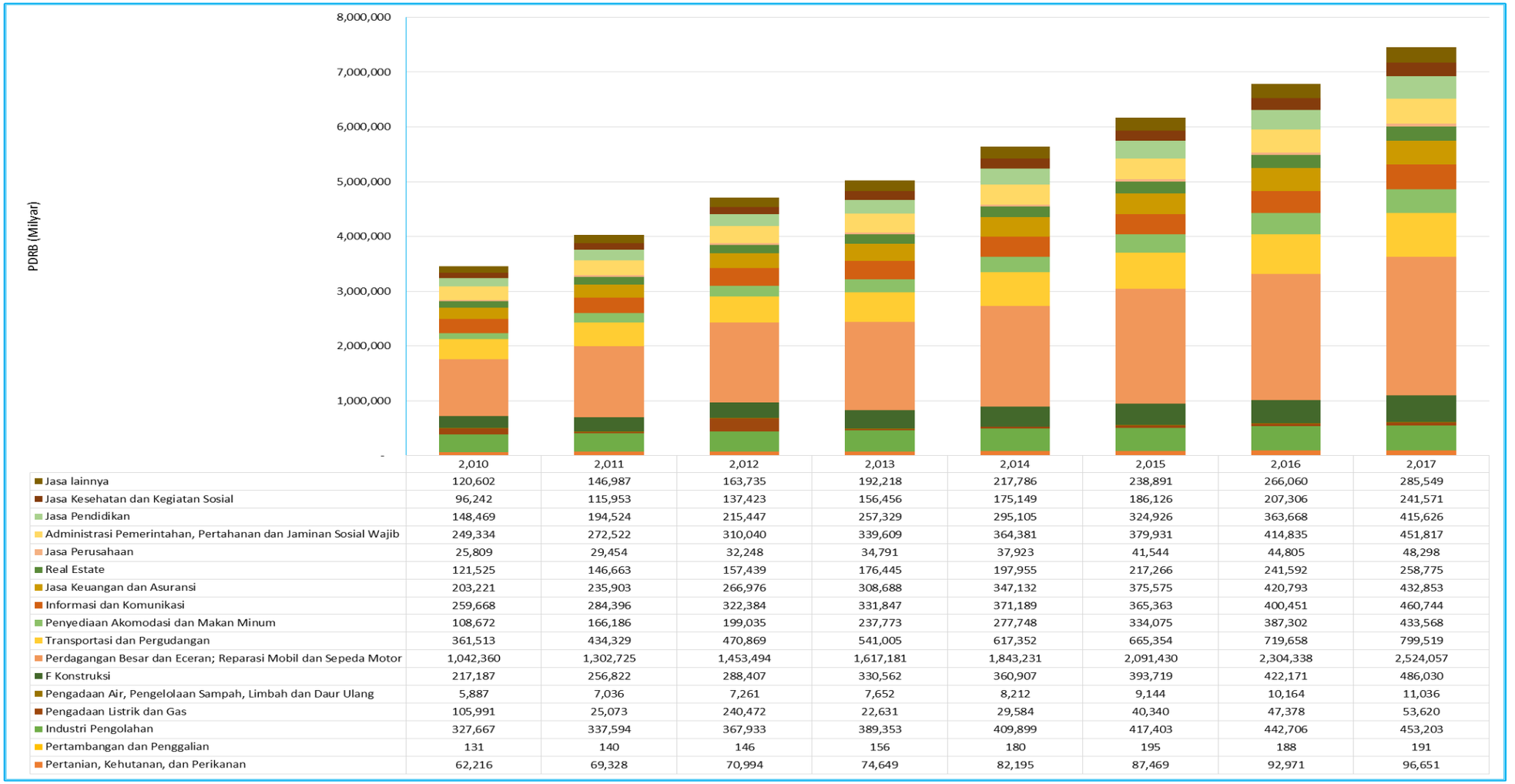

	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2,017
Jasa lainnya	120,602	146,987	163,735	192,218	217,786	238,891	266,060	285,549
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,242	115,953	137,423	156,456	175,149	186,126	207,306	241,571
Jasa Pendidikan	148,469	194,524	215,447	257,329	295,105	324,926	363,668	415,626
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	249,334	272,522	310,040	339,609	364,381	379,931	414,835	451,817
Jasa Perusahaan	25,809	29,454	32,248	34,791	37,923	41,544	44,805	48,298
Real Estate	121,525	146,663	157,439	176,445	197,955	217,266	241,592	258,775
Jasa Keuangan dan Asuransi	203,221	235,903	266,976	308,688	347,132	375,575	420,793	432,853
Informasi dan Komunikasi	259,668	284,396	322,384	331,847	371,189	365,363	400,451	460,744
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,672	166,186	199,035	237,773	277,748	334,075	387,302	433,568
Transportasi dan Pergudangan	361,513	434,329	470,869	541,005	617,352	665,354	719,658	799,519
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,042,360	1,302,725	1,453,494	1,617,181	1,843,231	2,091,430	2,304,338	2,524,057
F Konstruksi	217,187	256,822	288,407	330,562	360,907	393,719	422,171	486,030
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,887	7,036	7,261	7,652	8,212	9,144	10,164	11,036
Pengadaan Listrik dan Gas	105,991	25,073	240,472	22,631	29,584	40,340	47,378	53,620
Industri Pengolahan	327,667	337,594	367,933	389,353	409,899	417,403	442,706	453,203
Pertambangan dan Penggalian	131	140	146	156	180	195	188	191
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62,216	69,328	70,994	74,649	82,195	87,469	92,971	96,651

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana. Kawasan rawan bencana longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Rawan Gempa Bumi				
No	**Zona**	**Kecamatan**		
		Aur Birugo Tigo Baleh	**Guguk Panjang**	**Mandiangin Koto Selayan**
1.	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo BPA Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah				
1.	Zona Rawan Rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun

Rawan Gempa Bumi				
No	**Zona**	**Kecamatan**		
		Aur Birugo Tigo Baleh	**Guguk Panjang**	**Mandiangin Koto Selayan**
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago G. Bulek Campogo Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago G. Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Dari tabel di atas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

Gambar 2.9
Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Bukittinggi

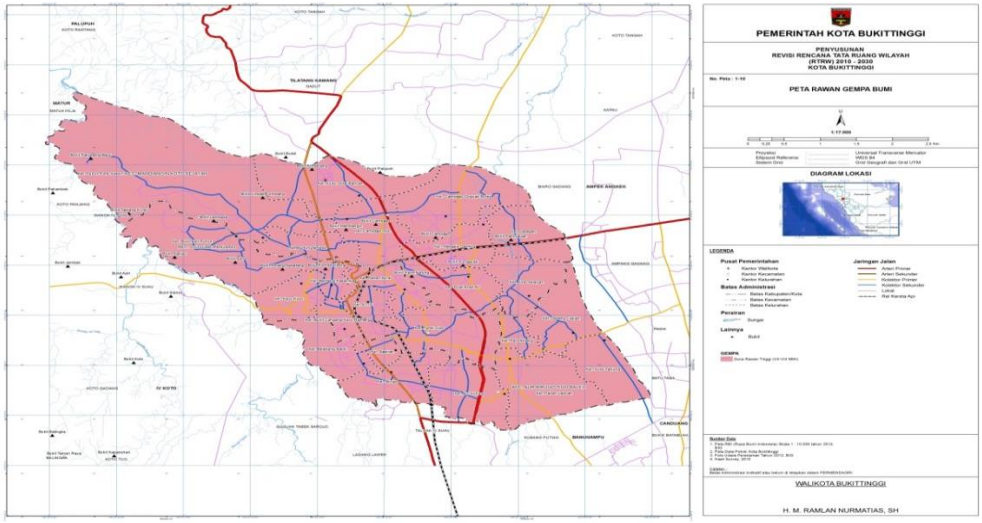

Sumber : *Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030*

Gempa Bumi merupakan pelepasan energi kejut yang merambat sebagai gangguan (*disturbances*) pada material pembentuk bumi. Perambatan gangguan (*propagation of disturbances*) sebagai pola gelombang tekanan (kompresi) tinggi bergonta ganti dengan tekanan rendah melalui masa material di dalam bumi, sehingga di permukaan bumi timbul getaran menghentak-hentak (*stick-slip*). Respon dari suatu area di permukaan bumi terhadap gempa, terkait ke 4 faktor, yaitu; sifat fisik dari material pembentuk area, kemiringan area, kekuatan gempa bumi dan struktur geologi area (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007). Kota Bukittinggi, meskipun terletak di luar jalur sesar aktif, namun akan menerima perambatan getaran seismik jika terjadi gempa bumi yang berhiposentrum pada jalur sesar tersebut.

2.1.4. Kondisi Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memilki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memilki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

2.1.4.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Penduduk merupakan subjek dari pembangunan, sehingga perkembangan jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Gambar 2.10

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kota Bukittinggi

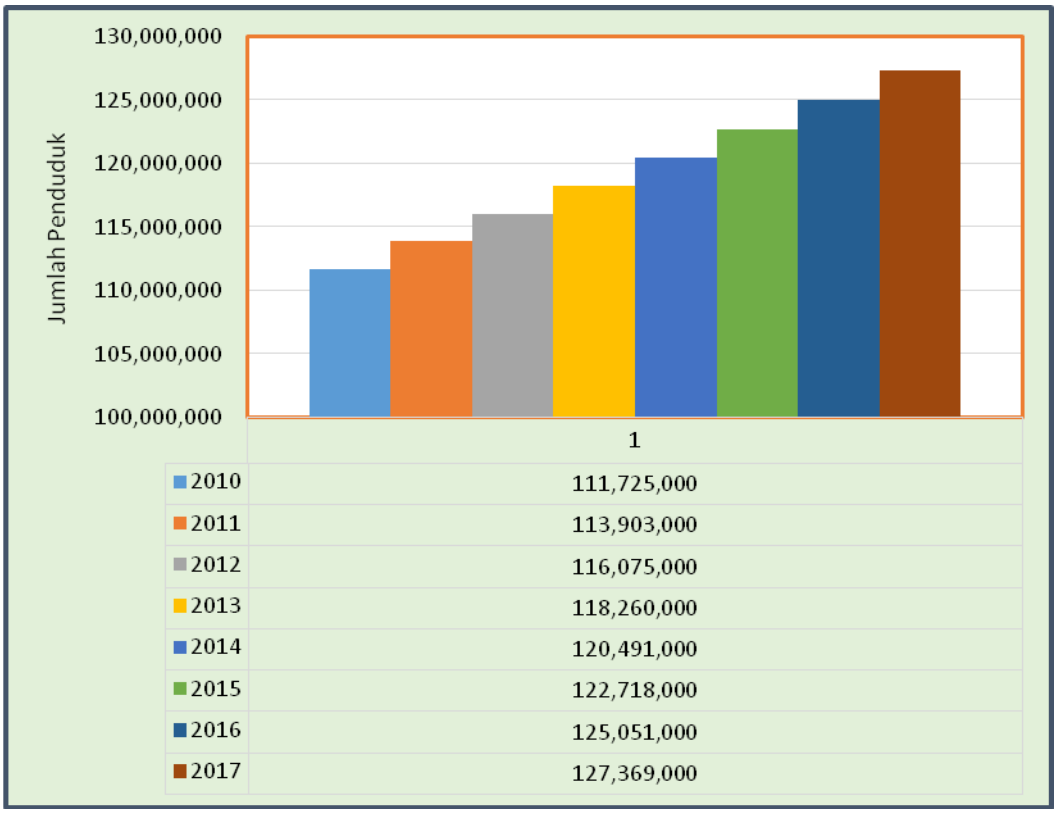

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2010-2017

2.1.4.2. Kepadatan penduduk

Dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,23 Kilometer persegi (Km²) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 127.369.000 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 5.048 jiwa/Km². Ini Artinya disetiap 1 Km² terdapat penduduk sebanyak 5.048 jiwa. Namun sebaran penduduk tersebut tidak merata di setiap wilayah kecamatan. Kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi berbeda pada tiap kecamatan. Kecamatan Guguk Panjang merupakan daerah kecamatan yang terpadat jumlah penduduknya, yaitu 6.482 jiwa/km2.

Meskipun dari segi jumlah penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jika diperhatikan laju pertumbuhannya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan semakin membaiknya upaya pemerintah Kota dalam menekan jumlah kelahiran dan laju migrasi penduduk ke Bukittinggi.

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk

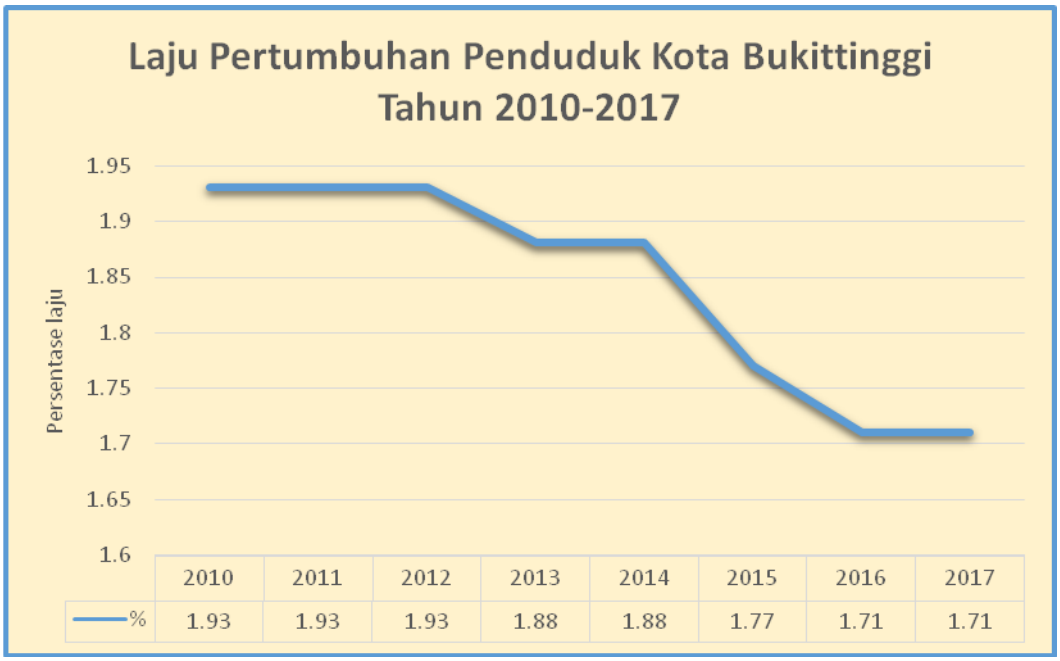

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2010-2017

2.1.4.3. Struktur penduduk

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk umur 15-29 tahun cukup banyak. Ini berarti Kota Bukittinggi memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi. Banyaknya jumlah penduduk produktif di suatu wilayah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan dengan ketersediaan

jumlah tenaga kerja produktif tidak akan menyulitkan investor ketika akan membuka lapangan usaha. Dengan mudah mereka akan mendapatkan tenaga kerja. Semakin banyak investasi yang masuk ke Kota Bukittinggi maka perekonomian akan semakin mengeliat dan terus berkembang. Secara tidak langsung perkembangan ekonomi suatu kota tentu sudah pasti akan terus mendorong kota tersebut menjadi kota yang semakin maju dan berkembang.

Gambar 2.12.
Proporsi Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur (dalam %)

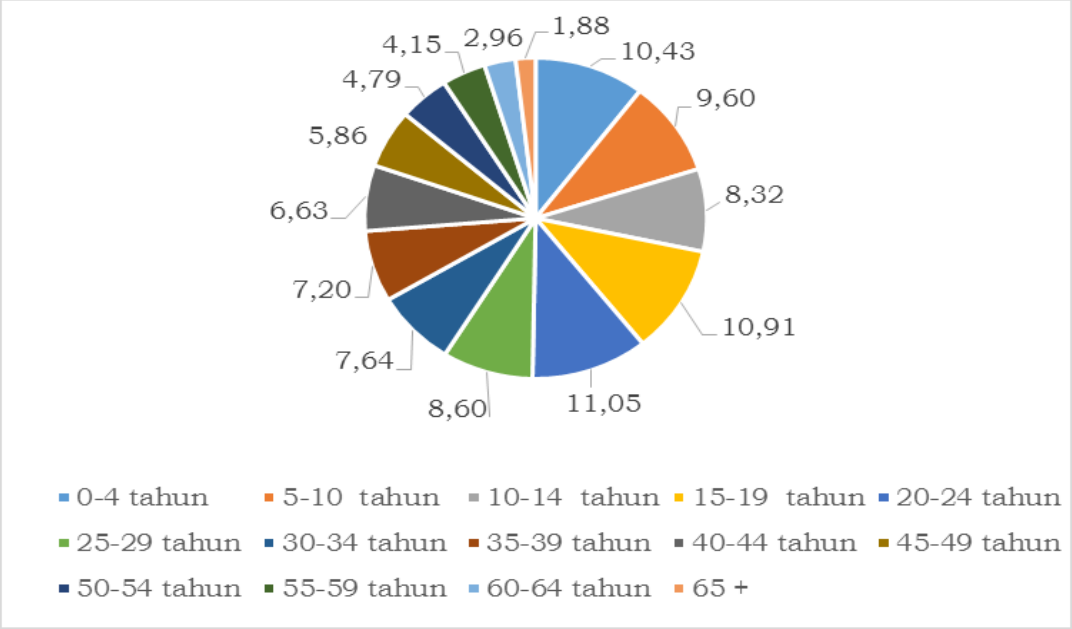

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Pada tahun 2017, kelompok peringkat tertinggi dari total jumlah penduduk adalah kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 11,05% dari total jumlah penduduk, disusul kelompok umur 15-19 tahun

sebanyak 10,91% dan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 10,43%. Sedangkan kelompok umur lainnnya dapat dikatakan kondusif. Banyak hal yang harus disiapkan dalam menghadapi 3 kelompok umur tertinggi dimaksud. Pada usia 0-4 tahun kita harus banyak meningkatkan dan memprioritaskan pada program kegiatan kesehatan ibu, bayi dan anak. Selain itu Pemerintah daerah bersama masyarakat harus menghitung tersedianya PAUD yang berimbang dengan jumlah anak anak usia 0-4 tahun tersebut.

Usia 15-19 tahun adalah usia produktif dan kreatif. Penduduk pada usia ini yang lazim disebut anak remaja yang penuh imajinasi untuk memanfaatkan masa remajanya. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam usia ini. Bagi para remaja yang produtif dan kreatif maka pemerintah daerah dan masyarakat harus dapat membaca kemana arah kreatifitas mereka dan harus menyediakan sarana dan prasarana mereka dalam mewujudkan kreatifitasnya, sehingga jangan sampai kreatifitas mereka menjadi tidak berkembang dan yang penting dijaga agar mereka tidak terpengaruh pada lingkungan yang negatif.

Pada usia 20-24 tahun adalah usia dimana penduduk tersebut telah mulai memasuki masa kedewasaan dan telah duduk di perguruan tinggi ataupun telah mulai terjun ke masyarakat untuk

kelangsungan hidupnya atau dunia kerja. Jika anak-anak pada usia tersebut tidak dibekali dengan ilmu dan agama yang kuat, maka tentunya kita khawatir akan berpengaruh pada kenakalan bahkan kejahatan, seperti pencandu narkoba, dan lainnya.

Untuk itu pada usia ini pemerintah harus menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak yang belum mampu untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Memperbanyak kegiatan dan program pelatihan untuk ketenagakerjaan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Penyaluran tenaga kerja, melakukan kerjasama dengan perusahan untuk penyaluran tenaga kerja. Bagi mereka yang telah mampu membuka usaha dan lapangan kerja sendiri, maka peran Pemerintah daerah adalah menekan jumlah pengangguran dan melakukan pembinaan kepada mereka salah satunya dengan memberikan bantuan permodalan.

Selain jumlah penduduk produktif, kualitas dari penduduk juga menjadi pertimbangan dan perhatian. Kualitas penduduk dapat terlihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Jumlah penduduk terbanyak adalah tamatan SMA sederajat yakni 37,24% dari jumlah penduduk seluruhnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi

No	Tingkat Pendidikan	Persentase (%)
1	Tidak punya ijazah	14,30
2	SD sederajat	17,00
3	SMP sederajat	18,10
4	SMA sederajat	35,80
5	Diploma I/II/III	5,30
6	Diploma IV/S1/S2/S3	9,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.4.4. Sosial Budaya Masyarakat

Walaupun sampai saat ini Kota Bukittinggi telah menjadi kawasan urban, namun secara budaya masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini dengan adanya gerakan kembali ke Nagari, hal ini akan berimbas pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat. Karakteristik tatanan kehidupan masyarakat Kurai Limo Jorong yang menjadi dasar filosofis budaya Kota Bukittinggi.

Tingkat mobilitas penduduk daerah sekitarnya ke Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan lokal dan regional ternyata sangat besar. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Agam sehari-harinya

berbelanja dan menggunakan fasilitas sosial dan ekonomi Kota Bukittinggi. Karena itu, perkiraan penduduk kota ini pada siang hari meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dihitung secara *dejure*. Jika pada malam hari jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada Tahun 2017 adalah 127.369.000 Jiwa maka pada siang hari jumlah penduduk Kota Bukittinggi bisa mencapai 382.107.000 Jiwa.

Migrasi penduduk ke dalam Kota Bukittinggi mengindikasikan kecenderungan meningkat yang antara lain terlihat dari banyaknya bermunculan pedagang kaki lima musiman, meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kunjungan lain seperti studi banding, seminar/konvensi, serta kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan manusia. Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus sumber daya manusia.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dan perbandingannya dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2.13.
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2017

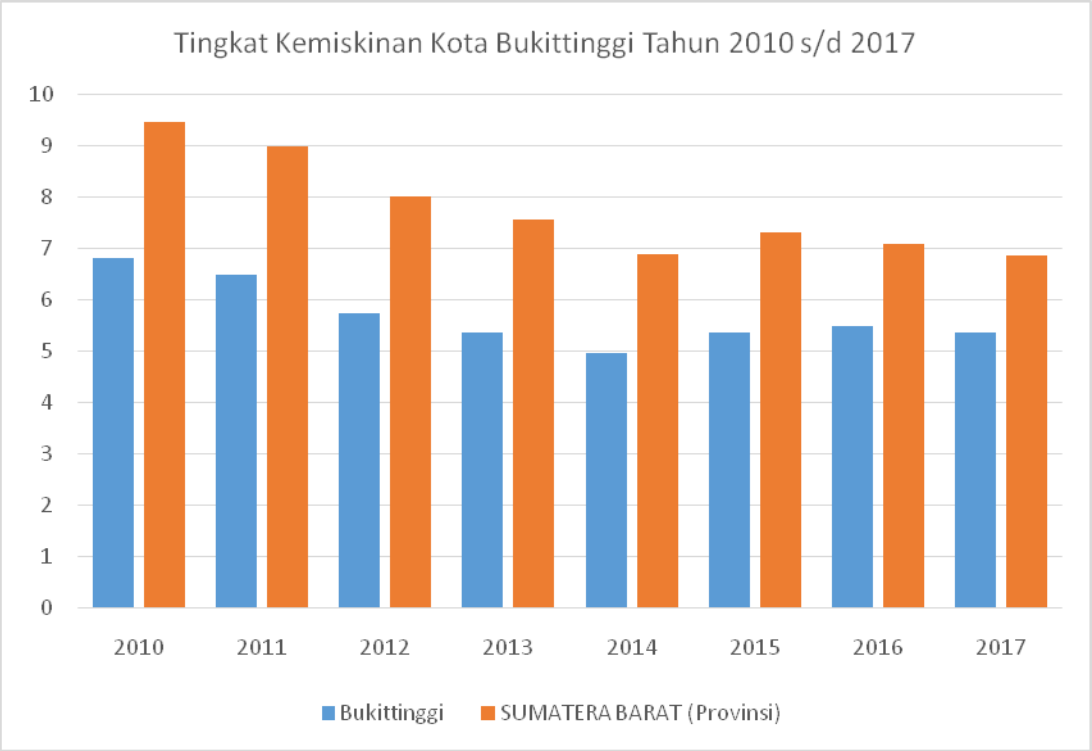

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Selama periode 2010-2017 pergerakan trend tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi cenderung membaik sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, namun demikian jika dilihat dari tren penurunannya pada kurun waktu 7 tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi lebih lambat dari pada tren penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

2.2.1.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Gambar 2.14.
Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d. 2017

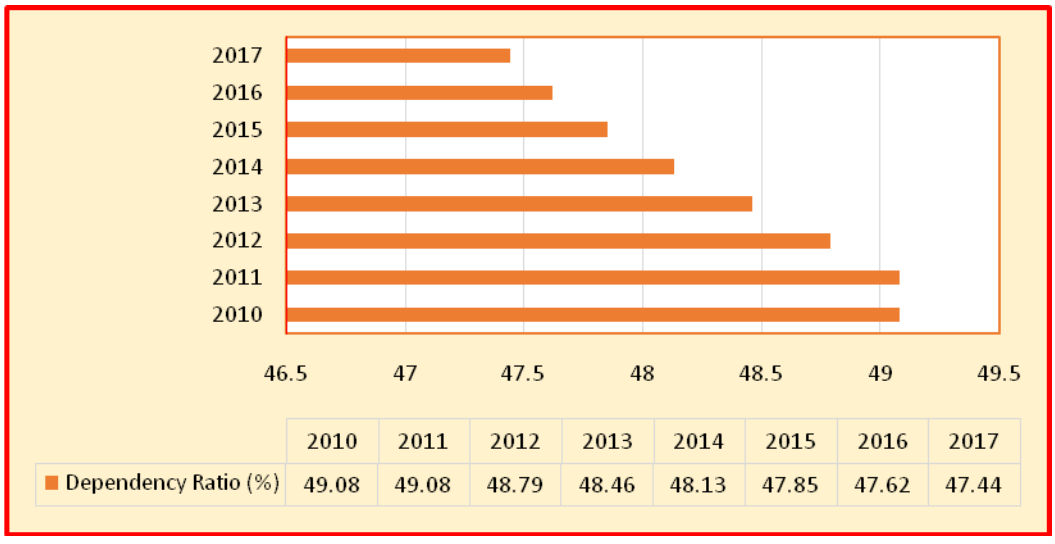

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dependency Ratio (%)	49.08	49.08	48.79	48.46	48.13	47.85	47.62	47.44

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2018

Dari tabel di atas terlihat kecenderungan semakin berkurang rasio ketergantungan di Kota Bukittinggi selama tahun 2010-2016. Ini berarti beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia yang tidak produktif lagi semakin berkurang dan ini berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

2.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Data tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2017

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat PartisiPasi Angkatan Kerja	64.51	64.51	67.83	67.33	62.72	65.45	67.59	68.21
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	7.15	7.15	7.06	8.11	4.24	2.52	6.04	5.31

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Selama 8 tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan partisipasi angkatan kerja, ini menggambarkan bahwa ketergantungan penduduk terhadap tenaga kerja makin lama makin kecil. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran

terbuka yang berfluktuasi pada 2,52 persen sampai dengan 8,11 persen. Meskipun secara umum menunjukkan tren penurunan, tingkat pengangguran terbuka angkatan kerja Kota Bukittinggi relatif masih tinggi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi antara lain angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Perkembangan angka melek huruf Kota Bukittinggi dalam 7 tahun terakhir menunjukan efektifitas sistem pendidikan dasar di Kota Bukittinggi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Gambar 2.15
Perkembangan Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2010 – 2017

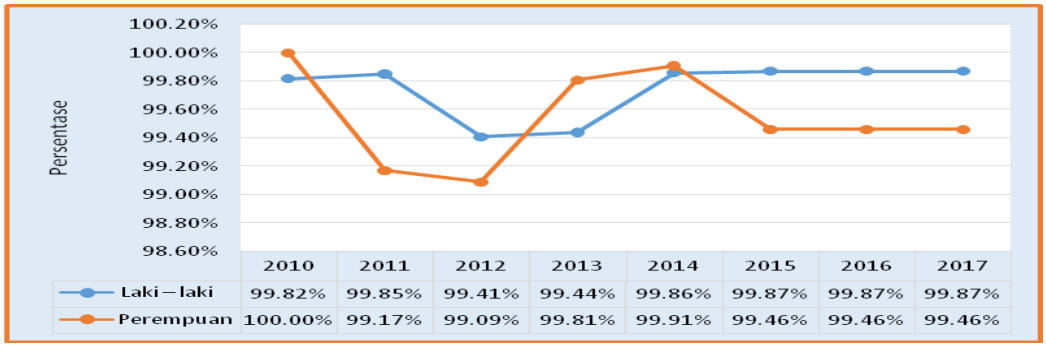

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laki – laki	99.82%	99.85%	99.41%	99.44%	99.86%	99.87%	99.87%	99.87%
Perempuan	100.00%	99.17%	99.09%	99.81%	99.91%	99.46%	99.46%	99.46%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh Penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bukittinggi dalam 7 tahun terakhir menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 rata-rata penduduk Kota Bukittinggi telah bersekolah sampai kelas 2 SMA yakni dengan rata-ratanya adalah 11,3 tahun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Gambar 2.16
Perkembangan Rata- Rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2010 – 2017

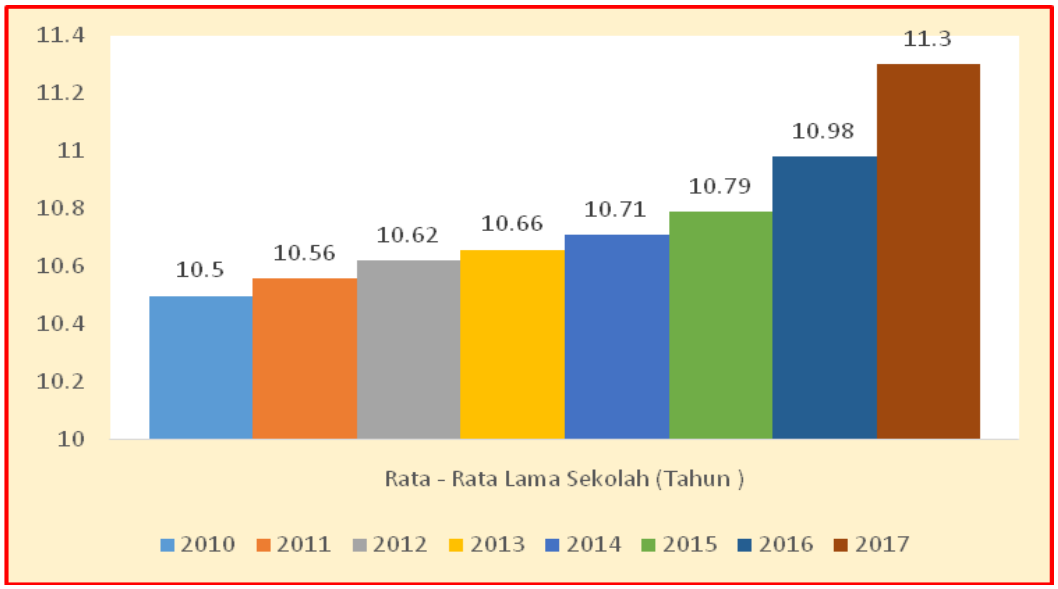

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kota Bukittinggi merupakan bagian dari bekas Kerajaan Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Ranah Minang.

Masyarakatnya terkenal dengan tata kehidupan yang mencerminkan sistem Matrilineal dengan adat istiadatnya yang unik. Dalam sistem ini harta pusaka, gelar, dan nama suku, diturunkan menurut silsilah garis keturunan ibu. Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakatnya yang mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan.

Walaupun sampai saat ini Kota Bukittinggi telah menjadi kawasan urban, namun secara budaya masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dilaksanakan dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masyarakat Minangkabau ”*Adaik basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*” sangat menonjol. Kaitan agama dan budaya dapat juga dilihat dari ungkapan "*syarak mangato adaik mamakai*". Saat ini dengan adanya gerakan kembali ke Nagari, hal ini akan berimbas pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat. Karakteristik tatanan kehidupan masyarakat Kurai Limo Jorong yang menjadi dasar filosofi budaya Kota Bukittinggi dapat digambarkan dengan adanva :

a. Nilai-nilai adat istiadat yang terintegrasi dengan nilai agama yang disebut dengan ungkapan *Syarak Mangato Adaik Mamakai*.
b. Pola kepemimpinan informal yang disebut *dengan Tali Tigo Sapilin* dan *Tungku Tigo Sajarangan* yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai.
c. Adanya sistem pemerintahan adat (struktur keruangan dan kelembagaan nagari yang masih hidup) yang secara hierarkis terlihat dari adanya Penghulu *Pucuak* yang dikenal dengan *Panghulu Pucuak Nan Duo Puluh Anam, Ninik Mamak Pangka Tuo Nagari* serta *Ninik Mamak Saratuih*.
d. Alim ulama sebagai unsur pimpinan masyarakat yang mempunyai peranan dalam mengendalikan dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Lembaga keagamaan yang utama di Kota Bukittinggi yaitu terdapat 8 sidang Mesjid sebagai bentuk pilar lembaga keagamaan, dalam hal ini Agama Islam.
e. Sistem matriarkat yang menempatkan keberadaan *Bundo Kanduang* sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tumpuan sistem keturunan dan pewarisan.
f. Semangat dan jiwa kewirausahaan yang telah tumbuh dan berkembang sampai saat ini.
g. Nilai dan semangat kebersamaan serta kegotongroyongan yang diliputi oleh suasana keakraban yang tinggi dan

pembauran antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang.

Di samping hal di atas, aspek sosial budaya lainnya yang berpengaruh terhadap pengembangan Kota Bukittinggi ke depan adalah keberadaan tanah-tanah ulayat/adat dimana dalam hal pengembangan pada tanah ulayat ini perlu dilakukan musyawarah warga. Hal ini sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menunjang pengembangan kawasan. Hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat disampaikan bahwa agar keberadaan tanah ulayat tidak hilang, maka pengembangan tanah ulayat dapat dilakukan dengan sistem sewa untuk dalam jangka waktu dan pola kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat selaku pemilik tanah dan investor sebagai pihak yang mengembangkan di atasnya. Akan tetapi kadang kala keberadaan tanah ulayat tidak jarang menjadi konflik dalam pembangunan. Banyak masyarakat yang tidak atau belum mau melepaskan tanah ulayatnya dimafaatkan untuk pembangunan fasilitas publik.

Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kekerabatan masyarakat yang sangat tinggi, meskipun tinggal di perkotaan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan ruang kota. Masyarakat merasa tanah ulayat dan harta pusaka tersebut harus dijaga sebagai kekayaan kaum hingga turun temurun.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Kodisi umum daerah terkait fokus urusan pemerintahan wajib Kota Bukittinggi dapat diamati melalui beberapa indikator berikut :

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

Kodisi umum daerah terkait fokus urusan pemerintahan wajib Kota Bukittinggi dapat diamati melalui pendekatan urusan sebagai berikut :

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah menunjukan persentase jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah. Berikut perkembangan angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.10.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2010 - 2017

Kelompok Umur	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7 - 12 Tahun	98.65	98.96	98.61	99.69	99.45	100	100	99.46
13 - 15 Tahun	97.43	90.16	93.82	89.63	97.64	99.57	98.26	97.62
16 - 18 Tahun	76.31	80.66	83.89	84.79	90.29	89.96	94.23	87.37

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kelompok usia 7 – 12 tahun angka partisipasi sekolah di Bukittinggi tergolong tinggi mendekati 100 persen, sementara untuk kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun jika diamati pada periode 2010-2017 trennya meningkat, namun persentasenya tidak setinggi pada kelompok usia 7-12 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada terjadi putus sekolah pada tingkat SMP dan SMA. Hal ini menjadi tantangan ke depan Kota Bukittinggi untuk menyediakan akses pedidikan yang lebih memadai bagi penduduk usia sekolah di Bukittinggi.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menyediakan akses bagi masyarakat usia sekolah untuk dapat bersekolah. Data ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat diamati pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017

Sekolah	Indikator	Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Murid							
		2010	2111	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD	Jumlah Murid	15.107	15.107	15.107	15.107	6.407	1.042	9.398	19.398
	Jumlah Sekolah	65	65	65	65	63	59	61	61
	Rasio Jumlah Sekolah Terhadap jumlah Murid	1:232	1:232	1:232	1:232	: 260	: 272	: 318	1 : 318

SMP	Jumlah Murid	6.300	6.300	6.300	6.300	6.330	6.280	6.280	6.127
	Jumlah Sekolah	13	13	13	13	14	11	11	12
	Rasio Jumlah Sekolah Terhadap jumlah Murid	1:485	1:485	1:485	1:485	1:452	1:571	1:571	1:511
SMA	Jumlah Murid	5.303	5.303	5.303	5.303	5.450	0.427	0.427	10.940
	Jumlah Sekolah	11	11	11	11	10	17	17	17
	Rasio Jumlah Sekolah Terhadap jumlah Murid	1:482	1:482	1:482	1:482	1:545	1:613	1:613	1:600

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Ketersediaan sekolah, dibandingkan dengan jumlah siswa untuk tingkat SD di Kota Bukittinggi pada periode tahun 2012 sd 2017 tergolong belum memadai, karena idealnya 1 sekolah dasar dapat menampung maksimal 250 orang siswa, sementara kenyataanya pada tahun 2017 rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tingkat SD adalah 1 : 318. Demikian pula untuk tingkat SMP dan SMA.

c. Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid

Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid pada tiap tingkatan pendidikan dapat memberikan gambaran terkait ketersediaan tenaga pendidik di Kota Bukitttinggi. Data rasio jumlah guru terhadap jumlah murid Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2017

Sekolah	Indikator	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD	Jumlah Murid	15.107	15.107	15.107	15.107	16.407	16.042	19.398	19.398
	Jumlah Guru	902	902	902	902	902	1.153	1.126	1.126
	Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 18	1 : 14	1 : 17	1 : 17
SMP	Jumlah Murid	6.300	6.300	6.300	6.300	6.330	6.280	6.280	6.127
	Jumlah Guru	406	406	406	406	406	549	549	534
	Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 11	1 : 11	1 : 11
SMA	Jumlah Murid	5.303	5.303	5.303	5.303	5.450	10.427	10.427	10.194
	Jumlah Guru	455	455	455	455	455	763	763	799
	Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 14	1 : 14	1 : 13

Sumber : Badan Pusat Statistik

Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid pada tiap tingkatan sekolah baik SD, SMP dan SMA sudah cukup memadai dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2017. Sehingga kebutuhan akan tenaga pendidik bukanlah menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang sangat vital dalam pembangunan karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat

mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Sarana kesehatan yang terdapat di Kota Bukittinggi antara lain 6 unit Rumah Sakit, 2 unit Poliklinik, 12 unit Puskesmas, 17 unit Puskesmas Pembantu, 100 unit Posyandu, dan 26 Poskeskel. Jumlah tersebut tentunya masih belum memadai untuk menampung tingginya permintaan akan fasilitas kesehatan di Kota Bukittinggi sebagai Kota Tujuan Kesehatan di Sumatera Barat, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi ke depannya dalam menyediakan sarana prasarana kesehatan yang memadai.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi untuk daerah terbangun, bentuk Kota Bukittinggi mencerminkan pola konsentrik, hal tersebut dipengaruhi letak geografis kota yang berada di tepi Ngarai Sianok. Keberadaan Ngarai Sianok membatasi perkembangan kota ke arah Barat dan sebagian arah utara, sehingga perkembangan kota cenderung mengarah ke timur. Hal ini juga dipengaruhi sistem jaringan regional yang melintasi Kota Bukittinggi, yang ikut membentuk pola ruang kota.

Sistem jaringan jalan regional yang melintasi Kota Bukittinggi membentang menghubungkan utara-selatan dan dari tepi ngarai ke arah timur, mendukung kecenderungan perkembangan Kota Bukittinggi ke arah timur.

Berbatasannya Kota Bukittinggi dengan wilayah Kabupaten Agam memberikan kecenderungan bahwa Kota Bukittinggi merupakan pusat pelayanan yang melayani wilayah sekitarnya, terutama wilayah perbatasan Kabupaten Agam sebagai pusat kegiatan permukiman. Semakin berkembangnya kawasan terbangun perkotaan ke arah timur semakin membentuk citra Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan perjalanan (destinasi) sementara pada wilayah sekitarnya (Kabupaten Agam) merupakan pusat domisili penduduk yang sehari-hari memiliki destinasi perjalanan ke Kota Bukittinggi. Kawasan permukiman belum tersebar merata ke seluruh Kota Bukittinggi. Persebaran kawasan permukiman umumnya masih berada di pusat-pusat kegiatan dan jalan utama kota, antara lain:

- Kawasan perumahan padat cenderung terdapat di area sekitar pasar, di Kel. Aur Tajungkang Tangah Sawah dan Kel. Aur Kuning;
- Kawasan perumahan baru cenderung berkembang ke arah Timur.

Dilihat dari kondisi rumah, di Kota Bukittinggi perumahan yang

ada terdiri atas perumahan permanen, semi permanen dan temporer. Pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Guguk Panjang rumah-rumah yang ada pada umumnya adalah rumah permanen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.17

Persebaran Bangunan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Konstruksi

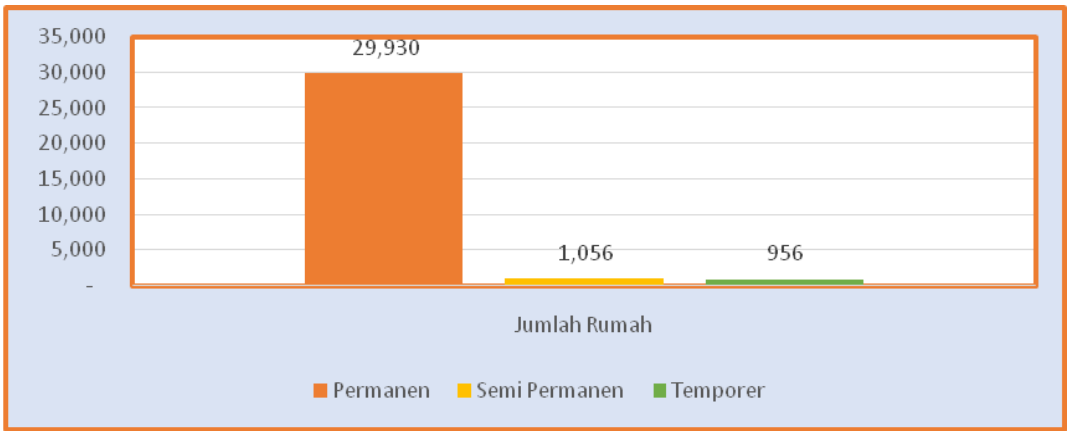

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2018

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing (*competitiveness*) daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek produktivitas total daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kemampuan ekonomi daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB sebagai ukuran produktivitas menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d. 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2017

No	Uraian	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62,85	`	62,85	62,85	65,04	66,72	67,92	9,42
2	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3	Industri Pengolahan	345,28	345,28	345,28	345,28	358,08	369,14	373,47	376,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,02	31,02	31,02	31,02	34,48	35,63	39,25	41,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,29	7,29	7,29	7,29	-	7,66	7,92	8,22
6	Konstruksi	282,10	282,10	282,10	282,10	295,21	312,60	331,16	359,86

No	Uraian	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.397,99	1.397,99	1.397,99	1.397,99	1.501,98	1.601,98	1.699,44	1.802,83
8	Transportasi dan Pergudangan	476,31	476,31	476,31	476,31	507,49	543,77	584,09	638,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,22	0,24	0,25
10	Informasi dan Komunikasi	326,69	326,69	326,69	326,69	348,12	375,06	402,41	439,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260,16	260,16	260,16	260,16	277,52	288,87	313,32	313,46
12	Real Estate	150,94	150,94	150,94	150,94	159,13	167,52	175,76	183,50
13	Jasa Perusahaan	30,84	30,84	30,84	30,84	32,07	33,46	34,88	36,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267,14	267,14	267,14	267,14	270,86	281,45	292,37	304,95
15	Jasa Pendidikan	209,06	209,06	209,06	209,06	222,94	239,47	257,08	279,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,35	129,35	129,35	129,35	139,85	151,30	163,49	177,88
17	Jasa lainnya	158,39	158,39	158,39	158,39	168,81	179,99	190,85	198,62
Produk Domestik Regional Bruto		**4.324,42**	**4.324,42**	**4.324,42**	**4.324,42**	**4.592,48**	**4.874,25**	**5.169,28**	**5.483,59**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018

Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi

sebesar 4.324.423,6 juta rupiah, pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka 5.483.598,43 juta rupiah.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan persentase sebesar 33,87%, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,73%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2013.

Sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB. Berikut disajikan distribusi PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18.

Distribusi PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010 s.d. 2017

No	Uraian	Distribusi PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.49	1.49	1.49	1.49	1.46	1.42	1.37	1.3
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	7.76	7.76	7.76	7.76	7.27	6.77	6.45	6.08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.45	0.45	0.45	0.45	0.52	0.67	0.7	0.72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
6	Konstruksi	6.59	6.59	6.59	6.59	6.4	6.38	6.22	6.52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.23	32.23	32.23	32.23	32.71	33.9	33.98	33.87
8	Transportasi dan Pergudangan	10.78	10.78	10.78	10.78	10.95	10.78	10.61	10.73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.74	4.74	4.74	4.74	4.93	5.41	5.71	5.82
10	Informasi dan Komunikasi	6.61	6.61	6.61	6.61	6.59	5.92	5.9	6.18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.15	6.15	6.15	6.15	6.16	6.09	6.2	5.81
12	Real Estate	3.52	3.52	3.52	3.52	3.51	3.52	3.56	3.47
13	Jasa Perusahaan	0.69	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.77	6.77	6.77	6.77	6.47	6.16	6.12	6.06
15	Jasa Pendidikan	5.13	5.13	5.13	5.13	5.24	5.27	5.36	5.58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.12	3.12	3.12	3.12	3.11	3.02	3.06	3.24
17	Jasa lainnya	3.83	3.83	3.83	3.83	3.86	3.87	3.93	3.83
Produk Domestik Regional Bruto		4.324,42	4.324,42	4.324,42	4.324,42	4.592,48	4.874,25	5.169,28	5.483,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan restoran, serta ketersediaan penginapan. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

2.4.2.1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana penting untuk mendukung kemajuan suatu kota. Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Gambar 2.18

Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Bukittinggi

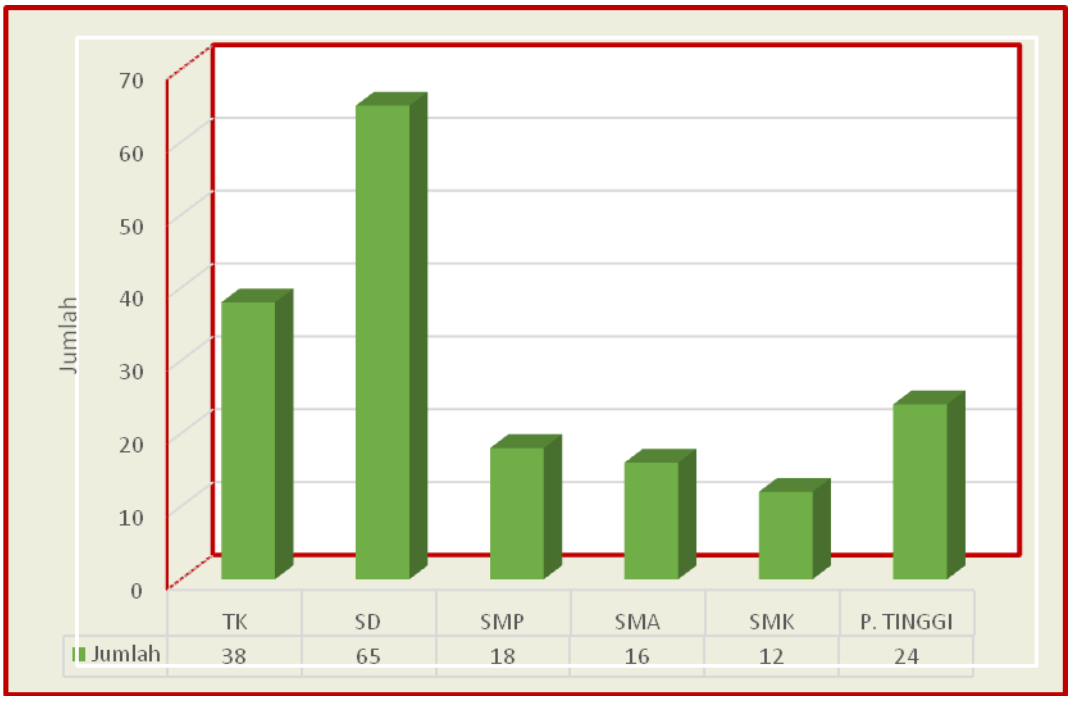

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015

2.4.2.2. Sarana Peribadatan

Pembangunan di bidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan pembangunan di bidang mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseimbangan dan keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan beragama yang harmonis antara umat beragama di daerah ini telah terjalin dengan kokoh. Sarana peribadatan yang terdapat di Kota Bukittinggi antara lain 44 unit Masjid, 146 unit Musala, 1 unit Gereja Katolik, 1 unit Gereja Protestan dan 1 unit wihara.

Gambar 2.19

Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Bukittinggi

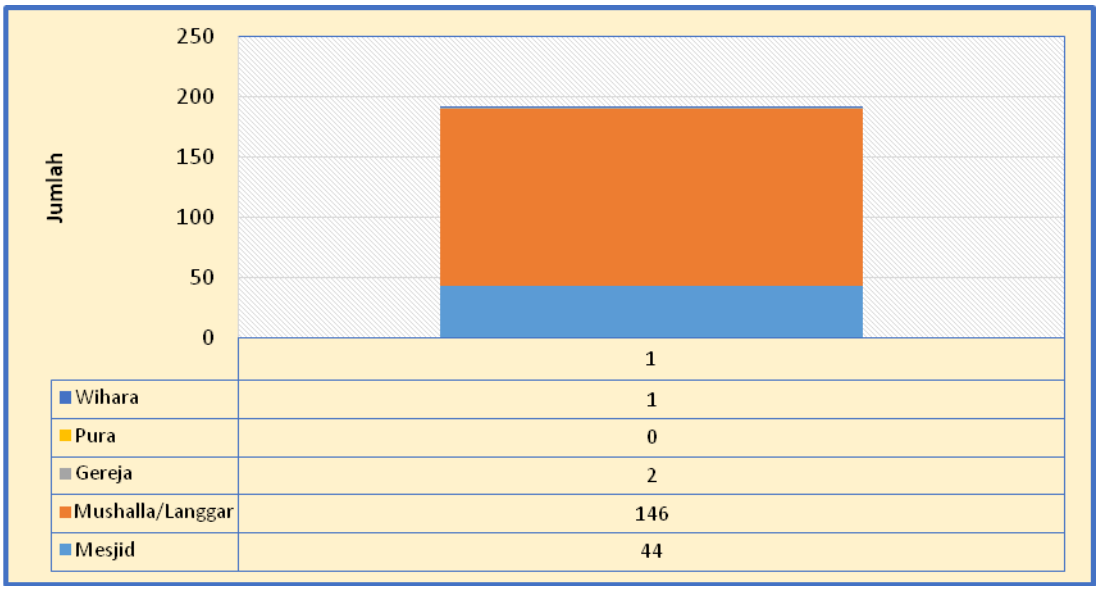

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015

2.4.2.3. Sarana Perdagangan

Selain sebagai kota pariwisata, Kota Bukittinggi juga dikenal sebagai kota perdagangan. Pasar Aur Kuning merupakan salah satu *landmark* Kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan. Di Kota Bukittingi terdapat tiga unit pasar dengan jumlah toko dan los adalah 8.457 unit. Ketiga pasar inilah yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Bukittinggi. Terutama Pasar Atas yang lokasinya sangat dekat dengan jam gadang sebagai *landmark* Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, guna mendukung perkembangan sektor pariwisata Kota Bukittinggi tentu saja sektor perdagangan harus dibenahi. Berikut tabel jumlah pasar, toko dan los di Kota Bukittinggi.

Gambar 2.20

Jumlah Pasar, Toko dan Los di Kota Bukittinggi

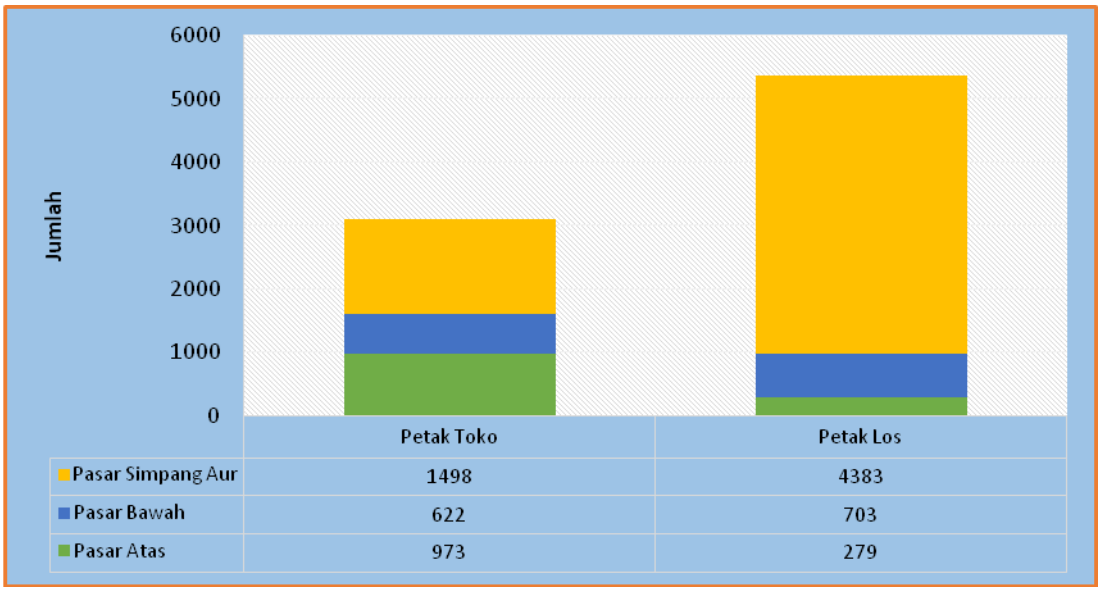

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2015

2.4.2.4. Sarana Persampahan

Pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan dibantu oleh beberapa Perangkat Daerah terkait seperti :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, mengelola sampah di pasar;
2. Dinas PUPR, mengelola sampah di saluran drainase;
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, mengelola sampah yang berada di lokasi objek wisata;
4. Dinas Perhubungan mengelola sampah terminal dan parkir.

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, total timbulan sampah Kota Bukittinggi sebanyak 693 m3/hari atau 20.790 m3/bulan.

Kemudian mengacu pada data UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat, timbulan sampah Kota Bukittinggi yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh tahun 2014 adalah 108 ton/hari, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.21

Rata-rata Berat Timbulan Sampah Kota Bukittinggi di TPA Regional Payakumbuh

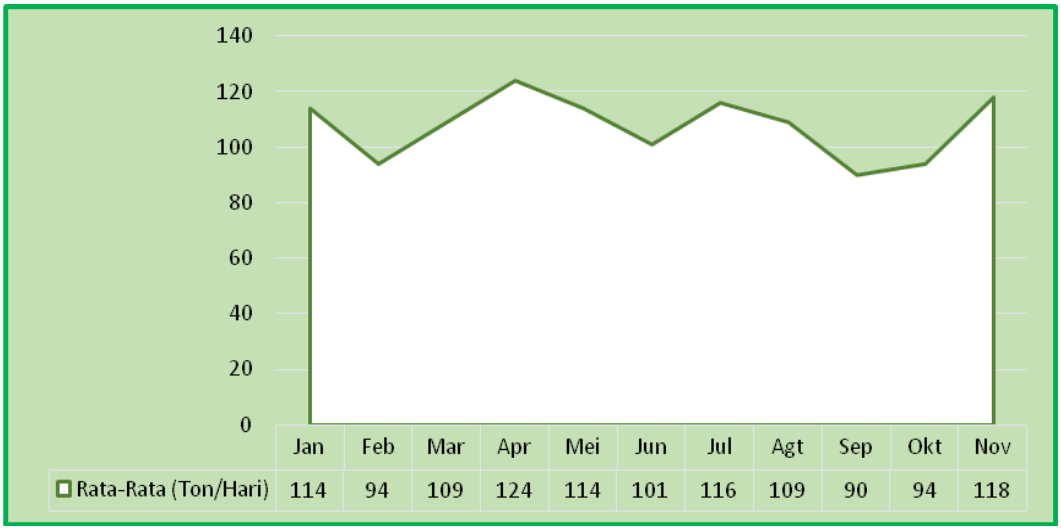

Sumber: Hasil Survey, 2017

Timbulan sampah untuk pasar di Kota Bukittinggi menurut data dari Dinas Pasar berkisar antara 6 m^3/hari. Puncak timbulan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yakni mencapai 8 m^3/hari. Pasar Kota Bukittinggi terdiri atas 3 pasar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) kontainer.

Dari sektor pariwisata di Kota Bukittinggi juga mengalami puncak timbulan sampah di saat liburan dan lebaran. Rata-rata lokasi objek wisata di Kota Bukittinggi disediakan oleh pihak Dinas

Lingkungan Hidup berupa tong sampah kembar terpilah sampah organik dan sampah anorganik berkapasitas masing-masing wadahnya 0,03 m^3.

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam menangani persampahan terminal menempatkan 24 drum sampah dan 1 (satu) unit kontainer untuk Terminal Aur Kuning. Pada terminal tipe C hanya tersedia 1 tempat sampah berbahan fiber untuk kantor petugas di terminal. Data volume timbulan sampah terminal tidak ada terdata oleh dinas perhubungan karena sampah terminal tercampur dengan sampah pasar.

2.4.2.5. Sistem Sumber dan Pewadahan

Sumber sampah di Kota Bukittinggi terdiri atas pemukiman/ domestik maupun non pemukiman/non domestik. Sumber sampah di Kota Bukittinggi rata-rata masih belum melakukan pemilahan. Pewadahan yang disediakan oleh pemerintah berupa TPS (Tempat Penampungan Sampah) berbahan plastik, kayu, batu dan kontainer. Hanya TPS berbahan plastik yang menerapkan pemilahan sampah, yakni sampah organik/ sampah basah maupun sampah anorganik/ sampah kering. Meskipun sudah dipisahkan wadahnya, namun hasil pengamatan di lapangan melalui uji petik, sampah masih dalam kondisi tercampur. Pewadahan serta volume wadah yang digunakan dalam pengelolaan sampah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar :

Gambar 2.22

Jumlah dan Kapasitas Wadah Sampah Kota Bukittinggi

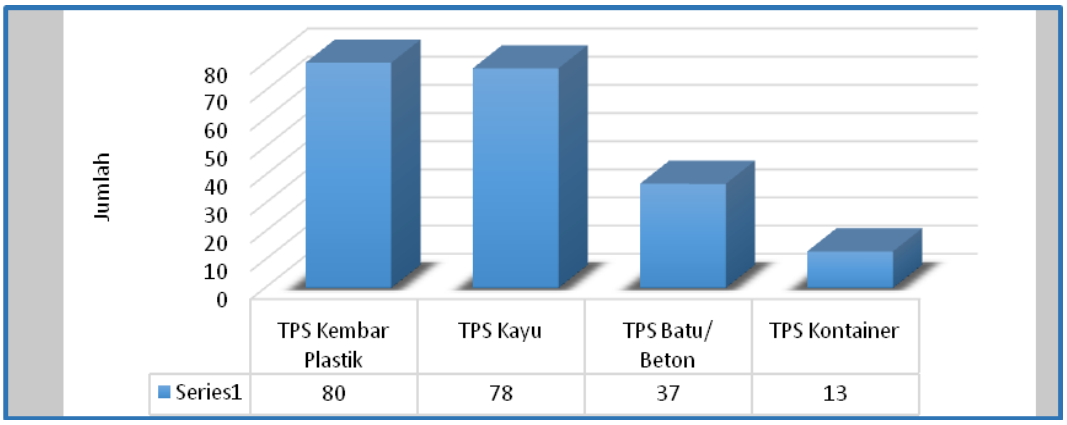

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2017

Dengan beragamnya sumber sampah Kota Bukittinggi, maka dilakukan penyebaran TPS. TPS kembar diletakkan di jalan-jalan utama dan fasilitas umum yang identik dengan keramaian. Sementara itu lokasi penempatan TPS Kayu, TPS Batu dan Kontainer di Kota Bukittinggi biasa dipusatkan untuk melayani suatu kawasan.

2.4.2.6. Ruang Terbuka Hijau

1. **Taman Panorama Baru**, merupakan taman hutan di bagian paling utara dari Kota Bukittinggi yang sering digunakan untuk *outbond*, berkemah dan kegiatan bertualang lainnya, memiliki luas 6.000 m^2.
2. **Lapangan Bukit Ambacang**, merupakan lapangan terbuka yang menjadi lapangan untuk pacuan kuda dan terkadang juga digunakan untuk atraksi lomba lainnya, seperti *motor cross* memiliki luas 22.500 m^2. Hanya saja sebahagian dari

lapangan ini yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi.

3. **Jalur hijau** pada bagian utara Jalan Veteran yang sekaligus menjadi ujung utara dari batas Kota Bukittinggi. Jalur hijau ini ditumbuhi tanaman kayu dan semak belukar yang secara topografis merupakan bagian bawah dari bukit (miring).

4. **Taman Balaikota,** kantor Walikota Bukittinggi berada di puncak bukit yang dikelilingi taman dan vegetasi yang tumbuh di sisi lereng bukit tersebut, memiliki luas 4.500 m^2. Taman tertata rapi dan sebagian merupakan ruang terbuka non hijau berupa plaza dan lahan parkir.

5. **Taman Makam Pahlawan**, adalah pemakaman untuk para pejuang yang terletak di bagian selatan jalan masuk (gerbang) Balaikota.

6. **Taman Gerbang Balaikota**, **Taman 66 dan Taman SBY** pada jalan masuk dan sekaligus menjadi median jalan terdapat taman yang juga dapat dikatakan sebagai pulau lalu lintas (*traffic island*) dengan posisi memanjang ke utara.
7. **Taman Pulau Jalan**, kedua taman ini juga berfungsi sebagai *traffic island* dan terletak berdekatan. Kendati tidak terlalu luas namun memberi kerindangan di tengah-tengah lalu lintas kendaraan sekaligus menjadi pengatur perputaran kendaraan.

8. **Taman DRPD Bukik Cangang**, Tidak jauh berbeda dengan taman-taman di atas di depan kantor DPRD lama (Bukik Cangang) terdapat *traffic island* yang memisahkan jalur jalan dan pembatas persimpangan kendaraan.

9. **Taman Tugu Bung Hatta**, merupakan bagian dari taman Istana Tri Arga yang menghadap ke timur yang berupa kombinasi taman hijau dan taman non hjiau. Keadaan taman tertata baik dan bersih serta sangat rindang.

10. **Lapangan Inkorba**, dengan luas 5.500 m^2 berupa lapangan terbuka seperti lapangan sepak bola yang terletak ditengah-tengah permukiman. Kawasan Inkorba ini berada di bagian timur Kota Bukittinggi yang merupakan cluster perumahan yang tertata cukup baik.

11. **Benteng Fort de Cock**, adalah lokasi dimana terdapat bekas benteng yang didirikan oleh Belanda semasa penjajahan. Benteng ini berada di salah satu bukit di tengah-tengah kota dan dikelilingi taman yang tertata asri.

12. **Taman Margasatwa**, berada di seberang Benteng Fort de Cock dan terhubung dengan jembatan unik, taman margasatwa memang merupakan kebun binatang mini yang menjadi objek wisata populer bagi masyarakat sekitar Bukittinggi. Dalam kawasan ini juga terdapat taman bunga dan rumah adat. Luas RTH Benteng dan Taman Margasatwa adalah 55.300 m^2.

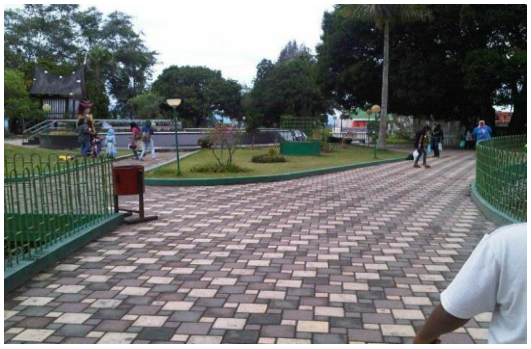

13. **Bantola**, merupakan stadion lapangan bola yang berada tidak jauh dari sisi Ngarai Sianok dan di sebelahnya terdapat Kolam Renang. Fasilitas olah raga ini menjadi arena olah raga resmi bagi anak sekolah di Kota Bukittinggi.

14. **Plaza Jam Gadang**, kendati didominasi oleh ruang terbuka non hijau memiliki luas 13.500 m^2, namun pepohonan yang ditanam di area ini cukup rindang dan tertata rapi. Jam Gadang merupakan ikon Kota Bukittinggi, berada di pusat kota dan dalam 2 tahun belakangan ini dilakukan pelebaran plaza secara signifikan.

15. **Taman Lereng**, taman ini berada di kemiringan 45 derajat yang yang menghubungkan Pasar Lereng dengan Jalan Pemuda. Perlu diketahui bahwa pusat kota Bukittinggi berupa pasar, yang terdiri dari Pasar Bawah dan Pasar Atas.

Kedua pasar ini berada pada ketinggian yang berbeda, yaitu antara 15-20 meter.

16. **Lapangan Kantin**, adalah lapangan yang sangat popoluer karena berada pada akses yang sangat tinggi (Jl. Jendral Sudirman) dan merupakan lapangan yang dibangun sejak zaman Belanda dengan luas 17.850 m^2. Lapangan ini menjadi tempat favorit untuk olah raga terutama lari pagi dan penyelenggaraan berbagai event *outdoor*.

17. **Panorama**, ini adalah taman yang paling banyak dikunjungi wisatawan, karena merupakan taman dengan panorama yang indah ke arah Ngarai Sianok. Di taman ini terdapat berbagai fasilitas wisata, berupa toilet, musala, warung, art shop, pelataran untuk penampilan dan pintu masuk ke Gua Japang (dibangun oleh tentara Jepang).

18. Tugu pahlawan tak dikenal terletak di Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah.

19. Taman Janjang Saribu yang terletak di Kel. Bukit Apit Puhun. Taman ini terdiri atas dua bagian yaitu taman janjang saribu bagian atas dan taman janjang saribu bagian bawah

Lokasi-lokasi di atas merupakan RTH yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Bila dilihat dari sisi pengertian umum ruang terbuka hijau, maka hutan, sawah, tegalan, makam, kolam, dan areal hijau yang belum terdapat bangunan (dibangun) termasuk kategori ruang terbuka hijau (RTH).

2.4.2.7. Prasarana Jaringan Transportasi

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai di suatu wilayah tentunya dapat menjadi salah satu faktor pendukung penting bagi jalur distribusi barang dan jasa. Selain itu juga dapat mendukung pergerakan / mobilitas penduduk wilayah tersebut dari dan keluar daerah. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sering menjadi syarat berkembangnya suatu wilayah dan juga bisa menjadi ciri majunya suatu wilayah.

Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas jalan, jembatan, dan terminal. Ke semua ini sangat mempengaruhi aksesibilitas Kota Bukittinggi. Hal ini juga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakatnya. Sebagai kota yang berkembang di sektor pariwisata dan perdagangan, transportasi menjadi sesuatu yang sangat penting.

Peranan transportasi itu sendiri adalah:

1. Sebagai penghubung antar daerah produksi ke pusat pengumpul/pusat pemasaran.
2. Membangkitkan aktifitas dan mobilitas penduduk keseluruh kawasan (pergerakan internal).

Dilihat dan kondisi *eksisting* jaringan jalan yang ada di Bukittinggi, sebagian besar sudah melalui dan menjangkau ke semua kelurahan Kota Bukittinggi yang juga didukung dengan jumlah moda transportasi yang telah cukup melayani kebutuhan mobilitas penduduk Kota Bukittinggi. Hal ini memudahkan aksesibilitas dan mobilitas baik yang bersifat eksternal maupun internal di Kota Bukittinggi. Namun, dalam beberapa segi perlu adanya peningkatan kualitas kondisi permukaan jalan untuk mendukung aksesibilitas Kota Bukittinggi dalam menunjang fungsinya.

Gambar 2.23

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Bukittinggi

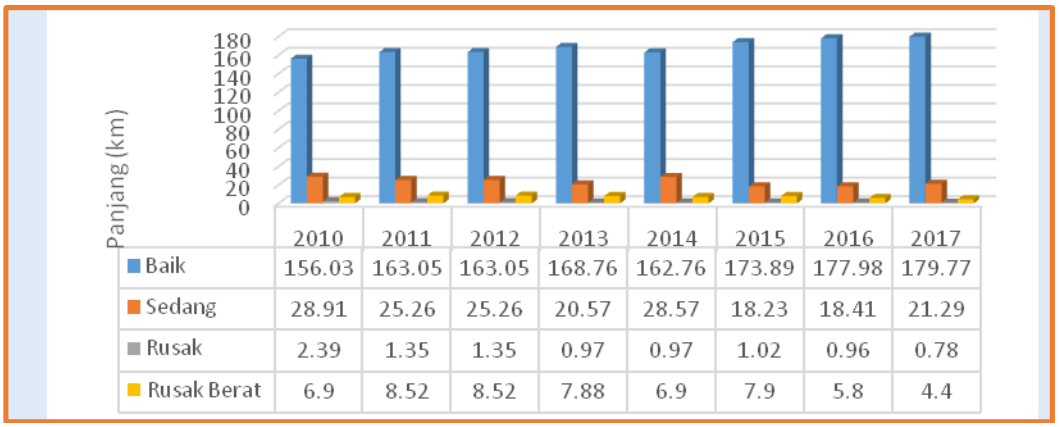

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baik	156.03	163.05	163.05	168.76	162.76	173.89	177.98	179.77
Sedang	28.91	25.26	25.26	20.57	28.57	18.23	18.41	21.29
Rusak	2.39	1.35	1.35	0.97	0.97	1.02	0.96	0.78
Rusak Berat	6.9	8.52	8.52	7.88	6.9	7.9	5.8	4.4

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi 2017

Berdasarkan kondisi jalan, dalam delapan tahun terakhir terjadi peningkatan panjang jalan di Kota Bukittinggi setiap tahunnya, panjang jalan dengan kondisi baik 156,03 km pada tahun 2010 menjadi 179,77 km pada tahun 2017, sedangkan untuk jalan dengan kondisi sedang, rusak dan rusak berat cenderung berkurang.

Secara umum, fungsi jaringan jalan di Kota Bukittinggi terdiri atas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Jalan arteri primer di Kota Bukittinggi merupakan akses keluar-masuk Kota Bukittinggi dari utara, timur dan selatan. Jalan arteri sekunder menjadi penghubung jalan arteri primer ke pusat-pusat kegiatan di Kota Bukittinggi.

Di Kota Bukittinggi terdapat satu terminal regional, yaitu Terminal Simpang Aur Kuning. Keberadaan Terminal Simpang Aur Kuning

di Jalan Arteri Primer berfungsi sebagai pergantian moda dari transportasi regional ke transportasi lokal (kota), sehingga para pelaku pergerakan regional melalui Terminal Simpang Aur Kuning dapat berganti moda ke transportasi lokal (angkutan umum kota) untuk melakukan pergerakan internal. Selain Terminal Simpang Aur Kuning terdapat pula terminal-terminal bayangan (terminal angkutan umum kota) seperti Terminal Pasar Bawah, Pasar Banto, Depan Hotel Jogja dan Surau Gonjong. Moda angkutan yang digunakan di Kota Bukittinggi terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum untuk pelayanan kota berupa MPU dan mini bus. Moda angkutan pariwisata umumnya berupa bus wisata yang memiliki pergerakan regional dan mendapatkan izin khusus untuk kepentingan pergerakan di dalam kota. Kondisi saat ini, angkutan umum di Kota Bukittinggi sudah dapat melayani keseluruhan wilayah Kota Bukittinggi, bahkan melayani wilayah hinterland.

Untuk mendukung kelancaran sistem transportasi di Kota Bukittinggi juga diperlukan fasilitas pendukung seperti halte. Di Kota Bukittinggi terdapat halte yang tersebar di beberapa ruas jalan utama dan dari kondisi halte yang ada saat ini, masih ada beberapa halte dengan kondisi yang kurang baik. Namun demikian fungsi dari halte ini juga belum maksimal. Masih banyak penumpang yang turun naik angkutan umum tidak pada halte. Begitu juga dengan kesadaran para sopir angkutan untuk

menurunkan dan menaikkan penumpang pada halte masih sangat rendah.

Selain angkutan mobil, motor dan kendaraan lainnya, dahulunya di Kota Bukittinggi pergerakan orangnya sudah dilayani kereta api. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kereta api mulai dihapuskan sebagai salah satu alat transportasi di Kota Bukittingi. Rel kereta api sudah hampir tak terlihat lagi, di daerah yang dulunya merupakan jalur kereta api sudah menjadi kawasan terbangun, menjadi perumahan dan pertokoan. Meskipun demikian lahan tersebut masih berstatus milik PT. KAI, lahan tersebut dipakai oleh masyarakat dengan sistem kontrak. Jadi jika sewaktu-waktu PT. KAI meminta kembali lahan tersebut, masyarakat tidak berhak menuntut ganti rugi atau apapun.

Rel kereta api melewati Kelurahan Manggis Ganting, Pulau Anak Air, Garegeh, Pakai Kurai, Aur Tajungkang Tangah Sawah, Tarok Dipo, dan Birugo. Panjang rel yang melewati Kota Bukittinggi adalah 5724,88 km². Lokasi stasiun saat ini adalah Aur Tajungkang Tangah Sawah. Kondisi stasiun sangat tidak terawat namun belum beralih fungsi untuk kegiatan lainnya. Jika kita merujuk pada rencana sistem transportasi nasional tentang pengembangan sistem transportasi pulau sumatera. Dalam rencana, kelak jalur kereta api ini akan menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Di dalam RTRW Provinsi Sumatera

barat juga disebutkan tentang rencana pengembangan jaringan kereta api di Kota Bukittinggi yang akan menghubungkan antar kota di Sumatera Barat. Maka mengaktifkan kembali kereta api merupakan salah satu detailnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depannya perlu diperhatikan garis sempadan rel kereta api. Garis sempadan ini merupakan batas terluar kawasan yang legal untuk dibangun. Garis sempadan ini adalah 50 meter ke kiri dan ke kanan rel. Kurang dari itu, jika masih dibangun berarti bangunan tersebut dapat dikatakan bangunan yang ilegal.

2.4.2.8. Prasarana jaringan listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan ternyata dari tahun ke tahun produksi dan jangkauan pelayanannya telah menunjukan peningkatan yang cukup berarti yang dikelola oleh PLN. Peningkatan pelayanan listrik PLN dapat dilihat dari jumlah mesin, daya tersambung, tenaga yang digunakan serta jumlah pelanggan yang ada. Berdasarkan informasi dari PLN Kota Bukittinggi jumlah trafo distribusi di Kota Bukittinggi 244 unit/36.815 kVA, dengan jumlah pelanggan 48.618 pelanggan, Daya terpasang adalah 66.300.000 VA, KWH jual adalah 9.275.416 kWH

2.4.2.9. Prasarana Air bersih

Sistem penyediaan air bersih di Kota Bukittinggi sudah mendapat

perhatian khusus dari pemerintah, yaitu dengan dibentuknya sebuah perusahaan daerah yang khusus menangani sistem penyediaan air bersih di Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum, mulai dari sumber sampai ke distribusi, termasuk bidang non teknis lainnya. Adapun Badan Usaha Milik Daerah Kota Bukittinggi yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jam Gadang. Namun hingga saat ini sistem penyediaan Air Minum di Kota Bukittinggi dalam operasionalnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya jumlah/ sumber air baku yang mengakibatkan tidak meratanya pelayanan baik itu kontiniutas, kuantitas maupun kualitas yang memadai.

Daerah pelayanan yang ada pada saat ini hampir mencakup keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, namun ada sebagian daerah pada kelurahan-kelurahan tersebut yang belum terlayani yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki. Dari keseluruhan luas daerah Kota Bukittinggi yaitu sebesar 25.239 km2 cakupan pelayanan baru dapat melayani sekitar 52.525 jiwa atau sekitar 42,56 % dari total jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar 2.24

Tingkat Pelayanan PDAM Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi

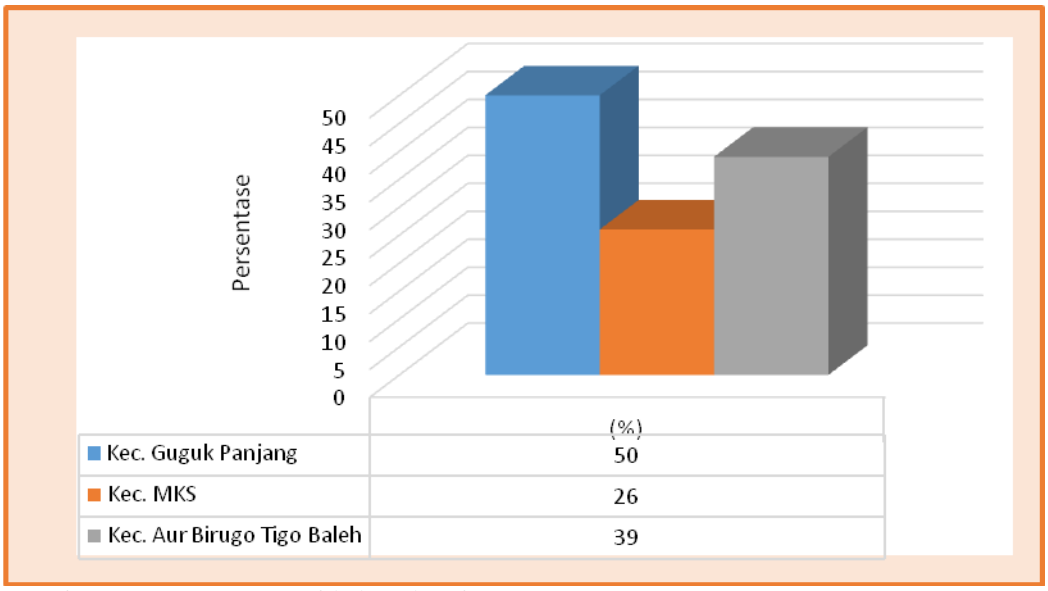

Sumber : PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2017

PDAM Kota Bukittinggi memiliki 1 (satu) Instalasi Pengolahan Air (IPA) lengkap yaitu IPA Tabek Gadang. Unit produksi IPA Tabek Gadang merupakan IPA lengkap terbuat dari baja dengan kapasitas terpasang 10 liter/detik dan 20 liter/detik. Sedangkan untuk unit produksi lainnya hanya melalui proses desinfeksi dengan sumber dari sumur dangkal, sumur bor dan mata air.

2.4.2.10. Prasarana Air Limbah

Pembuangan air limbah di Kota Bukittinggi semuanya menggunakan sistem setempat, dimana 79% penduduk sudah memiliki tangki septik/cubluk dan diprediksi tangki septik yang layak disebut tangki septik < dari 20 % sedangkan sisanya diperkirakan cubluk dengan pelayanan individu sedangkan 5 %

menggunakan pelayanan umum komunal dan sisanya menggunakan cara yang belum layak yaitu ke perairan terbuka atau ke kebun.

Saat ini pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan sistem setempat/*on-site*, baik secara individu maupun komunal. Air limbah yang dikelola hanya air limbah yang berasal dari WC (*black water*), yaitu untuk rumah menengah ke atas dengan menggunakan septik tank, sedangkan untuk yang menengah ke bawah masih menggunakan cubluk, dan penduduk yang belum memiliki fasilitas sanitasi masih membuang langsung ke badan air/drainase.

Menurut hasil observasi lapangan diprediksi secara visual air sungai Batang Sianok relatif jernih dan terlihat tidak banyak terpengaruh dari air limbah rumah tangga, sedang 2 sungai lainnya yaitu Batang Agam dan Batang Tambuo dipengaruhi oleh buangan air limbah rumah tangga, namun Batang Tambuo agak lebih baik dari pada Batang Agam yang secara visual sudah terlihat berwarna kehitam-hitaman dan berbau, menurut pengalaman kondisi seperti itu dapat diyakini bahwa kualitas BOD sudah lebih dari 50 mg/l (batas ambang yang diperbolehkan).

Pemerintah telah berupaya menangani pembuangan air limbah dan telah membangun MCK di beberapa lokasi dan diprediksi telah dapat melayani penduduk, bahkan sudah ada bantuan

untuk membangun MCK Plus-Plus di Kelurahan Pakan Kurai. Namun yang mendesak membutuhkan penambahan MCK Komunal terutama di kawasan permukiman di tepi Ngarai Sianok. Pemerintah Kota Bukittinggi telah membantu masyarakat dengan pembangunan MCK komunal dengan tingkat pelayanan hampir 5%.

Di Kota Bukittinggi sudah ada Kelompok Swadaya Masyarakat atau Sanimas Jangkak yang mengelola MCK plus, berlokasi di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. MCK plus ini dipakai masyarakat selain untuk mandi juga bisa untuk mencuci, Pembangunan MCK plus ini juga sudah didesain untuk pemanfaatan biogas. MCK plus ini dibangun pada tahun 2008 dan baru di bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada Mei 2009, MCK plus ini dibangun dari APBD dan APBN. Pemakai MCK plus ini sebanyak 25 KK, atau 100 orang. MCK plus ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapat layanan PDAM, setiap KK hanya menyumbang Rp 10 ribu/bulan. (dikutip dari Buku Putih).

Pada umumnya penduduk Kota Bukittinggi telah mempunyai tangki septik, namun hanya sebaian saja yang sesuai dengan standar SNI dan kebanyakan termasuk katagori Cubluk, yang potensial mencemari air tanah. .

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa

79,54 % penduduk sudah memilliki tangki septik atau sejumlah 21.247 KK, sedangkan dari hasil survei konsultan melalui kuisioner didapat jumlah pemilikan tangki septik 78,16 % atau 20.572 KK, dan tidak berbeda jauh dengan data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Jika dilihat pada kawasan yang padat dengan kondisi rumah sederhana, memiliki jamban sendiri, namun tangki septik umumnya tidak punya, karena lahan pekarangan hampir tidak memungkinkan untuk dibangun tangki septik dan biasanya dibuang langsung kesaluran di belakang rumah.

2.4.2.11. Prasarana Jaringan Drainase

Pesatnya perkembangan penduduk dan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan volume air buangan juga akan meningkat secara signifikan, Sehingga sistem drainase yang sudah ada sekarang tidak mampu menerima kapasitas air buangan yang meningkat tadi.

Saluran drainase yang ada di Kota Bukittinggi pada awalnya merupakan saluran irigasi. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka fungsi areal persawahan pun berubah menjadi areal permukiman. Hal ini secara otomatis menyebabkan saluran irigasi yang ada berubah ataupun bercampur menjadi saluran drainase. Adanya perubahan struktur tanah dari persawahan menjadi areal permukiman mengakibatkan

terganggunya daya resap tanah sehingga aliran permukiman (*run off*) menjadi semakin besar. Pada akhirnya kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya genangan di beberapa lokasi karena debit limpasan yang ada sudah tidak dapat lagi tertampung oleh kapasitas saluran. Sebagai akibat lebih lanjut, kelancaran aktivitas lalu lintas dan perdagangan menjadi terganggu serta menjadi sumber penyakit apabila tidak segera ditanggulangi.

Berdasarkan keadaan topografinya, daerah pelayanan sistem jaringan drainase di Kota Bukittinggi terbagi dalam tiga sub sistem, yaitu sub sistem Batang Agam, sub sistem Batang Tambuo, dan sub sistem Daujung. Masing – masing sub sistem ini mempunyai saluran primer, sekunder, dan tersier tersendiri. Adapun yang termasuk ke dalam sub sistem pelayanan jaringan drainase di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- **Sub Sistem Batang Agam**

  Pada sub sistem ini terdapat saluran induk dari Birugo Puhun menuju ke Batang Agam dan saluran induk dari Birugo ke Jembatan Besi, hingga pertemuan dengan Batang Agam di depan rumah potong hewan. Daerah pelayanan Batang Agam mempunyai jaringan drainase yang cukup padat, biasa digunakan untuk saluran pembuangan air hujan dan limbah.

- **Sub Sistem Batang Tambuo**

Beberapa saluran yang termasuk ke dalam sub sistem ini antara lain terdapat di Jalan Sutan Syahrir, Jalan Diponegoro, Jalan Prof.M.Yamin, Jalan Kubu Tanjung, Jalan Kurai, Jalan Dt.Majo Basa nan Kuniang, dan Jalan Mr.Assaat. Daerah pelayanan sangat luas karena Batang Tambuo ini terletak di tengah – tengah daerah pelayanan, dari selatan ke utara perbatasan Kota Bukittinggi

- **Sub Sistem Daujung**

  Saluran pembuangan utama adalah saluran irigasi, saluran pengumpul sepanjang Jalan Tigo Baleh, saluran drainase di Jalan Sumur, Jalan Ladang Cakiah, dan fasilitas gorong – gorong di Jalan Tigo Baleh. Daerah pelayanan terletak pada daerah yang sebagian besar masih berupa persawahan yang datar.

Saluran-saluran drainase memiliki pola yang sejajar dengan jaringan jalan, Daerah yang dilayani drainase terdiri dari 3 sub sistem, yaitu sub sistem Batang Agam, Batang Tambuo dan Daujung. Sehubungan dengan kondisi topografi yang relatif miring, dan ketinggian kota di atas permukaan laut yang cukup tinggi, maka hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pengairan air pada sistem drainase sehingga aliran permukaan mengalir langsung ke dataran yang lebih rendah yaitu Batang Agam dan

Batang Tambuo.

Sistem drainase di kota Bukittinggi secara umum dibagi dalam tiga sistem:

a. Sistem drainase terbuka. Sistem drainase terbuka saat ini cukup memadai untuk menampung dan mengendalikan air hujan.

b. Sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup saat ini juga memadai, namun terkendala dalam hal pembersihan/pengerukan sedimen, disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran (khususnya wilayah dalam pasar).

c. Sistem drainase saluran tanah. Sistem ini sudah lama ada dan sangat bermanfaat bagi drainase kota dikala hujan turun sehingga drainase tanah yang ada dapat menampung beban curah hujan yang cukup tinggi (contoh saluran di daerah Batang Agam dan Batang Tambuo).

Kondisi saluran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kondisi saluran pada lingkungan perumahan dalam kota Bukittinggi pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun jalan utama, dimana pada sisi jalan utama saat ini mempunyai saluran drainase yang cukup baik, sehingga baik pada musim hujan maupun musim kemarau saluran drainase

di lingkungan permukiman maupun di jalan utama masih dapat mengatasi air masuk ke dalam saluran.

- Letak kota Bukittinggi yang konturnya berbukit, sehingga air mengalir memanfaatkan gravitasi ke tempat yang lebih rendah.
- Drainase kota menggunakan saluran tertutup, bagian atas tutup saluran dijadikan site walk/trotoar, ±25 m diberi manhole untuk mengetahui kelancaran aliran air.
- Masih adanya genangan air pada saat musim hujan di beberapa tempat yang disebabkan belum adanya pembuatan drainase.
- Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan meluapnya air hujan ke jalan.

Persoalan-persoalan *eksisting* berkaitan dengan sistem drainase di kota Bukittinggi secara umum adalah sebagai berikut:

- Tidak mengalirnya air dari badan jalan ke saluran sehingga cenderung terjadi genangan air pada saat hujan.
- Terdapat beberapa saluran drainase yang memiliki dimensi/kapasitas lebih kecil dibandingkan debit atau limpasan yang mengalir sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara optimal, begitu pula dengan gorong-gorong, namun hal ini tidak berlangsung lama, ± 1 sampai dengan 2 jam dan normal kembali.

- Belum terselesaikannya saluran drainase di beberapa tempat, sehingga pada saat hujan akan terjadi genangan pada bagian pinggir jalan.
- Kurang berfungsinya tali air, sebagai tempat mengalirnya air hujan dari badan jalan ke saluran, hal ini dikarenakan kurangnya pemeliharaan, yang mengakibatkan tersumbatnya tali air tersebut akibat pengendapan kotoran atau sampah.
- Banyaknya sampah dan lumpur yang menyebabkan penyumbatan aliran air dan kapasitas saluran menjadi kecil sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang masuk terutama saat hujan lebat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran.
- Masih difungsikannya saluran drainase sebagai saluran air limbah.
- Tidak adanya sama sekali saluran drainase pada lokasi genangan dan disepanjang bahu jalan.

Sehubungan dengan penggunaan lahan, maka dalam Kota Bukittinggi terdapat areal persawahan sebesar 24 %. Oleh karena itu selain saluran drainase yang ada, masih terdapat ruas-ruas saluran irigasi yang juga banyak pembuangnya berakhir pada saluran drainase kota. Antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Gambar 2.25

Ruas Saluran Irigasi Dalam Kota Bukittinggi

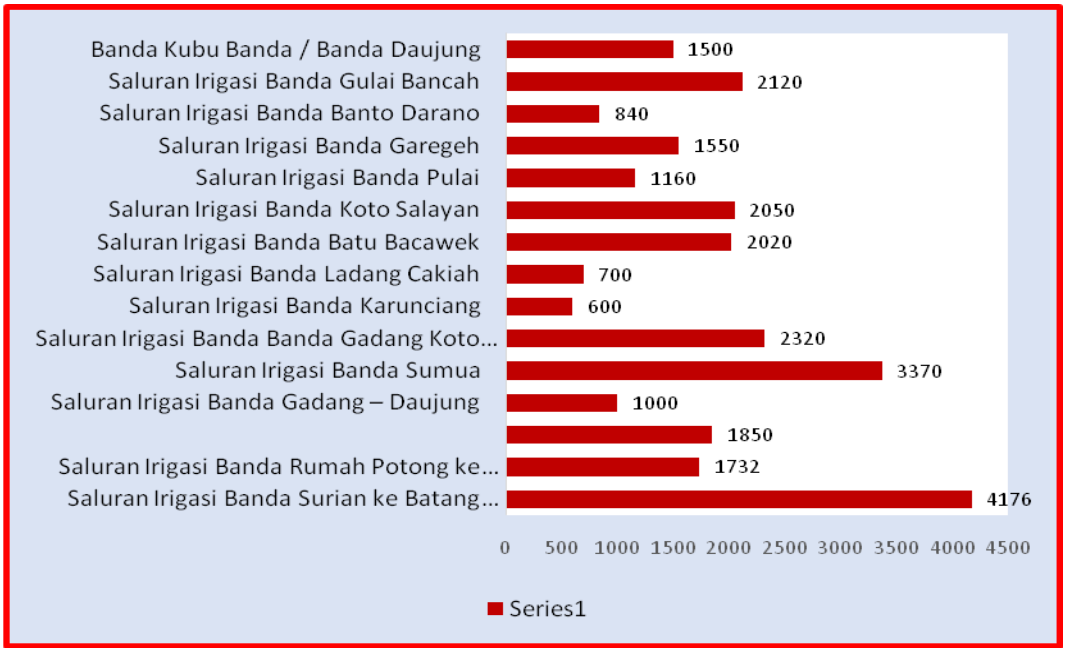

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2018

Dengan adanya persoalan-persoalan sistem drainase di kota Bukittinggi, menyebabkan terjadinya genangan pada daerah tertentu, dari hasil survei yang dilakukan maka diperoleh titik genangan sebagai berikut yaitu:

- Jalan Pabidikan / Panorama Baru
- Jalan Tabek Tuhur Bukit Apit
- Jalan Samping SD Al-Azhar Bukit Apit
- Jalan Kitanan Pintu Kabun
- Jalan Depan Masjid Baiturrahman Bukit Apit
- Jalan Jambak Dalam Kel. Bukit Apit
- Jalan Perempatan By pass Anak Air

- Daerah Pasar bawah, karena adanya bangunan riol Belanda
- Wilayah Pasar Banto

Genangan yang terjadi bukan genangan permanen tetapi hanya genangan sementara selama hujan berlangsung dan setelah beberapa jam kemudian akan kering. Luasan genangan berkisar antara 5 sampai 25 m^2 dengan kedalaman rata-rata 20 cm.

Berdasarkan data Master Plan Drainase Perkotaan Kota Bukittinggi, tidak ditemui daerah genangan permanen yang didefinisikan sebagai rawa, yang sepanjang waktu tergenang terus menerus. Genangan yang ditemui hanya berupa genangan sementara akibat intensitas hujan yang tinggi dan tidak adanya jaringan drainase yang baik untuk dapat mengalirkan air ke badan air. Ada beberapa perumahan yang terletak pada daerah cekungan seperti di daerah Pabidikan dengan luas genangan 0,874 Ha dan di daerah simpang By Pass dengan luas genangan 2,52 Ha. Untuk kawasan genangan yang tidak memungkinkan untuk dibangun saluran drainase maka untuk mengantisipasi genangan ini dapat dilakukan dengan membuat beberapa peresapan air hujan atau kolam penampungan (*ponds*).

Secara makro sistem saluran drainase perkotaan Kota Bukittinggi untuk kapasitas saluran primer yang ada masih mampu untuk menampung beban drainase untuk 25 tahun ke depan, terutama

untuk drainase Batang Tambuo, yang dari hasil perhitungan perbandingan Q limpasan = 10,699 m^3/det dan Q maksimum = 22,000 m^3/det. Jadi kapasitas saluran yang ada masih mampu menampung beban drainase hampir dua kalinya. Demikian juga untuk saluran primer yang lain rata-rata dapat menampung hampir dua kalinya.

Walaupun pada sistem drainase Kota Bukittinggi secara makro belum bermasalah, apalagi kalau drainase Simpang Jambu Air ke Jalan By pass jadi direalisasikan. Meskipun demikian perlu diingat untuk kedepannya, bahwa perlu dilakukan normalisasi saluran drainase. Tujuan dari normalisasi saluran atau sungai adalah untuk memperbesar kapasitas tampung dan memperlancar aliran. Kegiatan-kegiatan yang termasuk normalisasi saluran adalah memperdalam dan memperlebar sungai atau saluran, meningkatkan kualitas saluran dan membuat bangunan pelengkap drainase. Dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat dan *stakeholder* lainnya, sebagai contoh masalah pembebasan dan ganti rugi lahan tanah yang terkena pekerjaan ini. Oleh sebab itu sebelum melaksanakan kegiatan ini perlu kajian yang mendalam baik dari segi teknis maupun ekonomi dan sosialnya, kapasitasnya maupun konstruksinya sehingga dapat menyesuaikan dengan teknologi keairan masa depan. Termasuk manajemen pengelolaan operasi dan pemeliharaan.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan dalam mendukung berjalannya roda perekonomian, fasilitas penunjang seperti keberadaan fasilitas Bank adalah suatu keharusan. Keberadaan bank ini tentunya akan memperlancar transaksi keuangan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai fasilitas pelayanan dan kemudahan serta keamanan yang ditawarkan dalam transaksi perbankan. Jumlah perbankan di Kota Bukittinggi sebanyak 19 unit yang terdiri dari Bank Konvensional sebanyak 10 unit, Bank Syariah sebanyak 6 unit, dan BPR Konvensional sebanyak 3 unit.

Keberadaan perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi dalam mendukung aspek daya saing daerah cukup penting. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan, masih sebanyak 10 unit, yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian konvensional sebanyak 5 unit dan perusahaan asuransi jiwa konvensional sebanyak 5 unit.

2.4.3.2. Ketersediaan Restoran/Rumah Makan

Dalam menunjang keberdaan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata perlu ditunjang oleh berbagai fasilitas penunjang, salah satunya adalah keberadaan restoran dan rumah makan. Selain

guna menunjang kepariwisataan, hadirnya restoran dan rumah makan akan menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan pajak restoran. Perkembangan jumlah restoran dan rumah makan di Kota Bukittinggi tahun 2010 s.d. 2017 terlihat pada tabel berikut:

Gambar 2.26
Jumlah Restoran / Rumah Makan Di Kota Bukittinggi
Tahun 2010 – 2017

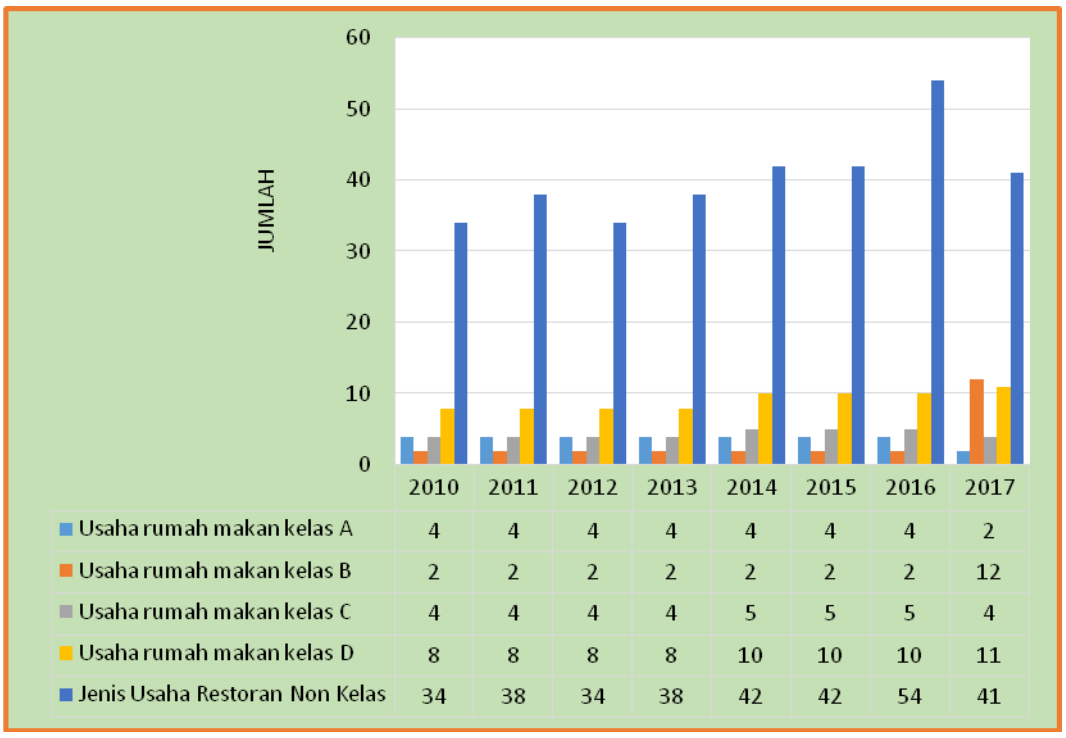

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Usaha rumah makan kelas A	4	4	4	4	4	4	4	2
Usaha rumah makan kelas B	2	2	2	2	2	2	2	12
Usaha rumah makan kelas C	4	4	4	4	5	5	5	4
Usaha rumah makan kelas D	8	8	8	8	10	10	10	11
Jenis Usaha Restoran Non Kelas	34	38	34	38	42	42	54	41

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2018

2.4.3.3. Ketersediaan Fasilitas Penginapan

Fasilitas penting lainnya dalam mendukung kepariwisataan Kota Bukittinggi selain dari keberadaan restoran dan rumah makan adalah penginapan/hotel. Sama halnya dengan keberadaan restoran dan rumah makan, dengan hadirnya banyak

penginapan/hotel di Kota Bukittinggi juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi melalui penerimaan pajak hotel. Kehadiran hotel tentu diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona Pariwisata yang memenuhi kriteria nyaman, bersih, sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan dengan suasana yang mencerminkan ciri khas daerah.

Kota Bukittinggi yang didukung dengan berbagai macam destinasi wisata dan iklim yang sejuk serta ditunjang dengan keamanan dan kenyamanan, tidak saja sebagai daerah wisata tetapi juga sering dijadikan tempat pertemuan baik skala lokal maupun nasional sehingga berdampak pada tingginya tingkat hunian penginapan/hotel.

Jumlah penginapan / hotel di Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebanyak 66 unit yang terdiri dari 18 hotel berbintang dan 48 hotel non bintang dengan total kamar 1.703 unit yang terdiri dari 924 unit pada hotel berbintang dan 779 unit pada hotel non bintang.

- Angka kriminalitas

  Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, dan

sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas Kota Bukittinggi dengan berbagai jenis tindak kriminal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Gambar 2.27

Angka Kriminalitas Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d. 2017

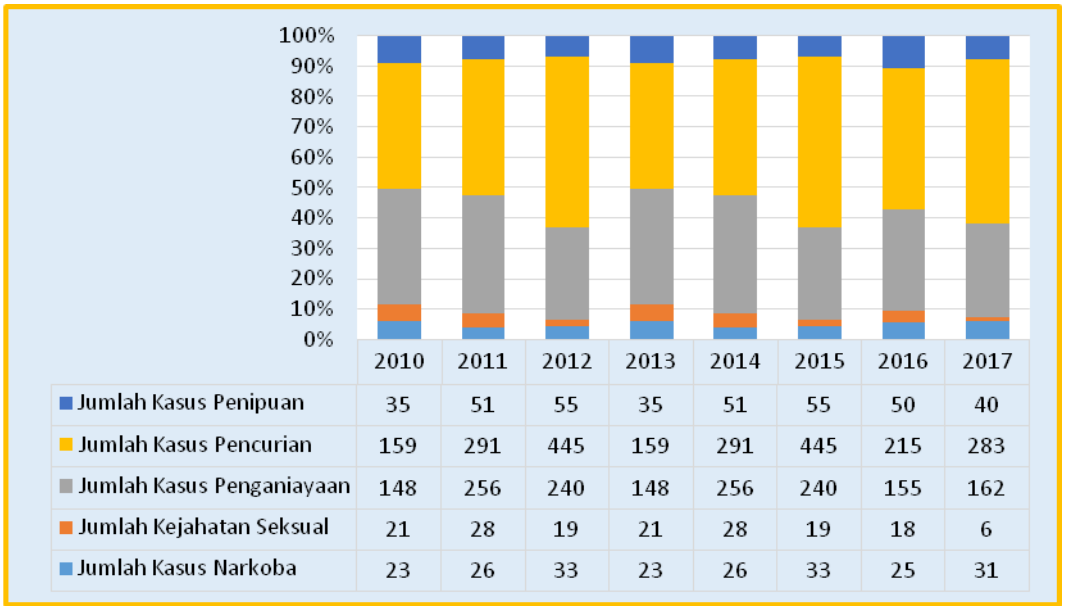

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus Penipuan	35	51	55	35	51	55	50	40
Jumlah Kasus Pencurian	159	291	445	159	291	445	215	283
Jumlah Kasus Penganiayaan	148	256	240	148	256	240	155	162
Jumlah Kejahatan Seksual	21	28	19	21	28	19	18	6
Jumlah Kasus Narkoba	23	26	33	23	26	33	25	31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Perkembangan angka kriminalitas Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan dalam 8 tahun terakhir terutama pada Tahun 2015. Namun perlu digarisbawahi bahwa wilayah hukum Polres Bukittinggi melingkupi Kota Bukittinggi dan Wilayah Agam Bagian Timur, sehingga tindak kriminalitas pada wilayah administratif Kota Bukittinggi tergabung juga dengan tindak kriminalitas di sebagian wilayah administratif Kabupaten Agam.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam bidang pembangunan manusia, tingkat kemajuan dapat diukur dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mengutip isi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Oleh karena itu, IPM merupakan ukuran tingkat pembangunan lebih baik bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita yang bersifat tradisional.

Gambar 2.28
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2017

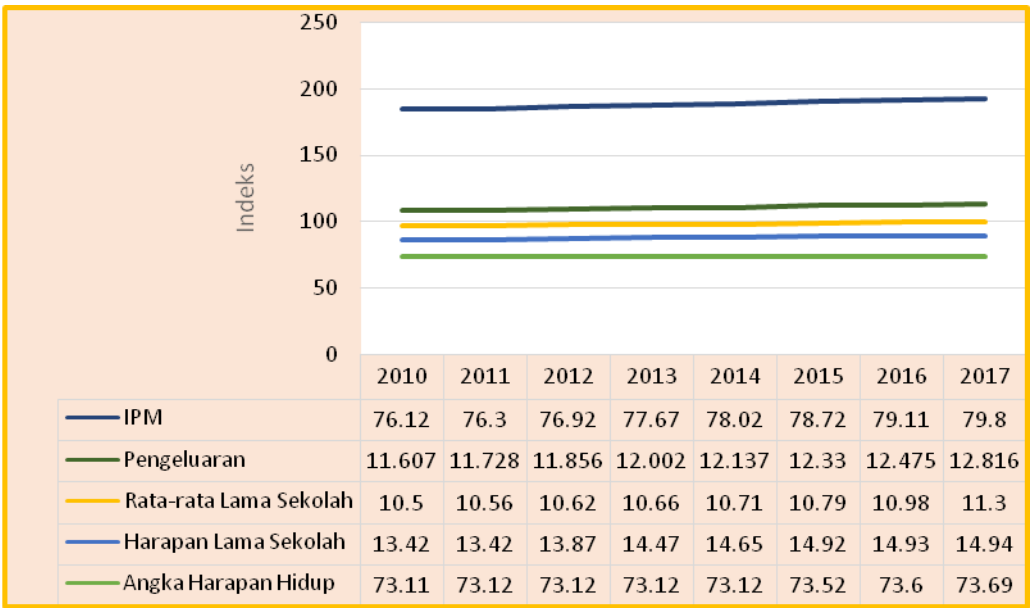

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IPM	76.12	76.3	76.92	77.67	78.02	78.72	79.11	79.8
Pengeluaran	11.607	11.728	11.856	12.002	12.137	12.33	12.475	12.816
Rata-rata Lama Sekolah	10.5	10.56	10.62	10.66	10.71	10.79	10.98	11.3
Harapan Lama Sekolah	13.42	13.42	13.87	14.47	14.65	14.92	14.93	14.94
Angka Harapan Hidup	73.11	73.12	73.12	73.12	73.12	73.52	73.6	73.69

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan gambar di atas, IPM Kota Bukittinggi pada tahun 2017 telah mencapai indeks 79,80 sementara kondisi rata-rata untuk Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 71,24 dan secara nasional indeks pembangunan manusia indonesia pada Tahun 2017 adalah 70,8. Sehingga capaian HDI Kota Bukittinggi tersebut telah dalam kondisi yang relatif baik dan perlu dipertahankan.

Hal ini merupakan prestasi yang baik dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kota. Tingkat IPM setinggi itu menurut pengalaman berbagai negara sedang berkembang, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi, dalam arti yang lebih luas.

Persoalan yang masih tersisa adalah bagaimana merubah arah pemerataan pembangunan manusia ke proses pencapaian kualitas manusia untuk segala bidang kehidupan. Kualitas pendidikan menjadi fokus pada masa yang akan datang, agar menghasilkan manusia yang produktif dan mampu bersaing dalam era globalisasi mendatang. Kualitas manusia diharapkan perlu memiliki ciri tersendiri dan memiliki unsur pencapaian intelegensia, pengembangan emosional dan pemantapan spritual. Karena itu, unsur aqidah perlu dijadikan sebagai salah satu unsur pencapaian tujuan pendidikan. Termasuk juga kedalam hal ini

kualitas jasa pelayanan pemerintahan dan kondisi ekonomi masyarakat untuk mendorong pencapaiannya.

Hasil dari kualitas pelayanan demikian diharapkan akan menghasilkan daya saing terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat kota. Secara spesifik dengan keadaan pencapaian IPM yang tinggi tersebut didorong pula oleh potensi dimana masyarakat yang lahir dan besar di Kota Bukittinggi memiliki potensi ekonomi dengan sumberdaya manusia.

Potensi wirausahawan muda terlihat dari tumbuhnya kreatifitas yang besar dalam mendorong dan mengembangkan sektor perdagangan baru, baik pengolahan maupun pemasarannya. Potensi tersebut perlu lebih dioptimalkan lagi di masa mendatang. Secara eksternal, perubahan pola kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks, kebutuhan akan kualitas pendidikan masih belum dapat dipenuhi, yaitu khusus menyangkut kualitas pendidikan berbasis Aqidah.

Demikian juga dengan perubahan transisi demografi, yang telah mencatat berbagai karakter yang berkembang. Sumatera Barat telah ditempatkan menjadi salah satu daerah yang memiliki penyakit degeneratif yang tinggi pada jenis penyakit stroke.

Pada saat bersamaan proses transisi demografi telah menghasilkan pula komposisi penduduk usia tua menjadi meningkat ditambah lagi dengan tingginya angka migrasi penduduk kembali ke Sumatera Barat. Implikasi perubahan eksternal ini bagi pembangunan manusia adalah akan terjadi kebutuhan pelayanan yang besar terhadap peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

Dengan dipahami kondisi pembanguan manusia yang berada di Bukittinggi serta potensi yang dimiliki, diperkirakan dalam jangka panjang Kota Bukittinggi perlu merumuskan kembali posisi yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, posisi penting yang dapat dijadikan konsensus adalah bahwa Kota Bukittinggi perlu bersiap diri untuk memasuki era pelayanan internasional dalam bidang pembangunan pendidikan dan pembangunan bidang pelayanan khusus di bidang kesehatan.Selanjutnya, beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaran sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek.

Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*).

Ketiga adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan siap memasuki pasar kerja.

Terakhir, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang

urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok.Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah daerah.Secara operasional,

urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Dalam pembahasan dokumen ini permasalahan pembangunan akan diuraikan selaras dengan gambaran kondisi umum daerah sehingga akan terlihat keterkaitan yang jelas antar bagian pada dokumen perubahan RPJPD ini.

3.1.1. Permasalahan Pengamalan Agama dan Budaya Daerah

Perkembangan pembangunan Kota Bukittinggi secara jangka panjang dikhawatirkan dapat menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang dianut, terutama terkait penerapan "*Adaik basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*". Apalagi dikaitkan dengan konsep pengembangan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata, sulit untuk membatasi masuknya kebudayaan dari daerah lain ataupun dari negara lain masuk ke Bukittinggi dan mempengaruhi tatanan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Bukittinggi.

Konsep dan gerakan kembali ke nagari yang telah diterapkan harus didukung dengan konsep lainnya terutama untuk membentengi generasi muda Kota Bukittinggi dari pengaruh kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan filosofi "*Adaik basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*" yang telah dianut ini.

Masih belum kuatnya pengetahuan dan pengamalan pendidikan karakter generasi muda dikawatirkan akan menggerus tatanan kearifan lokal masyarakat Kota Bukittinggi. Adanya tindak kekerasan yang melibatkan anak dan adanya kasus hukum yang melibatkan anak pada beberapa menuntut untuk disusunnya kebijakan pengembangan pendidikan karakter mulai dari usia dini di Kota Bukittinggi.

3.1.2. Permasalahan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Proses pembangunan akan berjalan dengan baik tentunya dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini yang masih dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip di atas.

Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri.Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.Permasalahan yang dihadapi

Pemerintah Kota Bukittinggi sekarang ini adalah belum maksimalnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah.Permasalahan ini perlu diatasi melalui peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan membenahi perencanaan dan penetapan kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pembentukan SOPD Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat.Selain itu, berkaitan dengan kelembagaan pemerintah daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal serta permasalahan kelembagaan berupa belum optimalnya fungsi kelembagaan kecamatan, pelimpahan kewenangan dan rentang kendali yang belum jelas.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana optimal dikarenakan masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.Selain itu manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri.Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membawa implikasi perubahan

paradigma kepegawaian.Namun Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunannya belum ditetapkan sesuai tuntutan Undang-Undang tersebut untuk dapat menyempurnakan sistem kepegawaian secara nasional dan di Bukittinggi.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan juga ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik akan optimal jika didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai kebutuhan penerima layanan.

Permasalahan pemenuhan gedung kantor yang dihadapi pemerintahan daerah Kota Bukittinggi antara lain gedung kantor yang masih bergabung dengan kantor lain, menumpang atau memanfaatkan gedung lain yang masih menjadi aset ataupun bukan aset pemerintah kota, luasan gedung yang belum maksimal menampung personil kantor, gedung satu kantor yang terpisah relatif jauh, dan lain sebagainya. Misalnya Kantor DPRD yang memanfaatkan gedung nasional, posisinya yang tidak mendukung ketika terjadi rapat pleno atau paripurna yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, serta keterbatasan ruang sidang, dan alat kelengkapan DPRD.

Kondisi ini sangat mendesak untuk dilakukan pembangunan gedung baru yang representatif sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis dan mendukung tugas-

tugas DPRD selaku penyelenggara pemerintahan. Beberapa Perangkat Daerah juga masih menggunakan gedung bersama dan menggunakan gedung lain.

Dukungan sarana dan prasarana lainnya berupa furnitur, peralatan gedung kantor dan peralatan kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas kerja, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, mewujudkan *e-government* merupakan komitmen yang terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Pemenuhannya diupayakan dengan peningkatan sarana dan prasarana berupa *hardware* dan *software* serta peningkatan sumber daya manusia berupa *brainware*.

Mewujudkan Bukittinggi *smart city* seiring dengan pembangunan kota dan potensi Bukittinggi sebagai kota kunjungan, pariwisata dan jasa juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk layanan publik. Kondisi saat ini Bukittinggi belum memiliki dukungan yang memadai untuk pengembangan jaringan, aplikasi dan sumber daya manusia untuk memenuhinya.Sementara itu kondisi dan potensi Bukittinggi sangat mendukung.

3.1.3. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Kota Bukittinggi adalah kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,23 Kilometer persegi (Km^2) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 126.804 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 5.072 jiwa/Km^2. Angka kepadatan penduduk ini lebih tinggi dibandingan kepadatan penduduk Kota Padang Panjang sebagai kota terpadat kedua dengan kepadatan hanya 2.279 jiwa jiwa/Km^2 dan jauh diatas Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang hanya 1.334 jiwa/Km^2.

Meskipun Kota Bukittinggi berhasil menekan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 berada dibawah 2 persen, dan secara kecenderungan terus mengalami penurunan dari 1,93 persen tahun 2010 menjadi 1,71 persen tahun 2017. Namun masih terdapat permasalahan terkait pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk melalui pengaturan kawasan pemukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Kota Bukittinggi. Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan masalahan sosial lainnya seperti kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, persampahan, serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

Salah satu indikator mengukur kondisi sumber daya manusia adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).IPM Kota Bukittinggi secara umum sudah sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata IPM Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat. IPM Kota Bukittinggi tahun 2017 sebesar 79,80 sedangkan Sumatera Barat hanya 71,24. IPM Kota Bukittinggi berada pada urutan kedua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang sebesar 81,58.

Keberhasilan pembangunan manusia pada suatu daerah akan terlihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan data IPM. Selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu untuk terus ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan daerah pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi akan tetap menjadi prioritas pemerintah Kota Bukittinggi secara jangka panjang dalam rangka menjamin kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

3.1.3.1. Permasalahan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Kinerja pendidikan Kota Bukittinggi pada masa lalu relatif sudah baik,

namun tantangan kedepan juga tidak ringan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa beberapa kewenangan kabupaten dan kota telah diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi berwenang dalam mengelola Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karena harus diserahkan ke pemerintah provinsi, efektif tahun 2017.Selama ini penyelenggaraan pendidikan SLTA termasuk unggulan Bukittinggi yang telah mengukir berbagai prestasi dan memperoleh berbagai penghargaan.

Selain itu, persoalan pendidikan juga akan berdampak terhadap penyelesaian aset dan sumber daya kependidikan yang perlu ditata sedemikian rupa. Beberapa program unggulan Kota Bukittinggi seperti pendidikan berbasis aqidah juga belum maksimal sehingga belum mampu menjadi ikon kota sebagaimana yang diharapkan. Terwujudnya masyarakat cerdas yang disertai kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau juga belum dapat diukur pencapaiannya karena belum tersedia indikatornya.Permasalahan ini timbul karena belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat.Selain itu tingkat kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan saat ini.Berikut yang tidak kalah pentingnya mempengaruhi kualitas pendidikan adalah manajemen

pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik.

3.1.3.2. Permasalahan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.Pemerataan akses pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yaitu Indonesia Sehat.Semenjak tahun 2014 Pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Program BPJS kesehatan.Kehadiran program ini mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai pemerintah ataupun secara mandiri. Sampai saat ini lingkup kepesertaan di Bukittinggi relatif sudah baik mencapai 81% dari target nasional (100%) pada tahun 2019.

Terkait itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah persyaratan layanan kesehatan yang berjenjang untuk tingkat rujukan, sehingga dibutuhkan rumah sakit daerah. Kondisi Bukittinggi yang berada di persimpangan dan sebagai kota tujuan wisata juga menyebabkan Bukittinggi rentan tertular penyakit, begitu juga dengan daerah sekitar Bukittinggi. Karena itu Bukittinggi membutuhkan penanganan penyakit yang tepat dan dapat diakses secara cepat.

Unit layanan kesehatan yang ada di Bukittinggi relatif dekat, bahkan mudah diakses tidak hanya oleh masyarakat Bukittinggi, tetapi juga luar kota.Namun ini juga merupakan tantangan tersendiri, sehingga kebijakan Bukittinggi terutama untuk layanan kesehatan juga perlu mempertimbangkan penduduk kota dan bukan penduduk kota, sehingga alokasi anggaran kesehatan dapat dimaksimalkan untuk warga kota. Walaupun pada prinsipnya persoalan bukan hanya masalah daerah dalam batas administratif saja, karena akan mencakup wilayah yang berdekatan.

Permasalahan lain yang harus disikapi belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu fokus terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat, penciptaan lingkungan hidup yang sehat juga menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

3.1.3.3. Permasalahan Gender dan Disabilitas

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta permasalahan keterlibatan anak dalam masalah hukum di Kota Bukittinggi menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun kebijakan jangka panjang daerah yang dapat mencegah serta melindungi perempuan dan anak dari

permasalahan hukum dan kekerasan.

Masih belum tersediannya Lembaga perlindungan anak dan perempuan seperti Pusat Krisis Perempuan (PKP), Pusat Krisis Terpadu (PKT), Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) di Kota Bukittinggi perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan jangka panjang yang responsif terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Pemerintah Kota Bukittinggiperlu meningkatkan jumlah dan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak, fasilitator pemberdayaan perempuan, tenaga rehab sosial, serta tenaga terlatih layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Permasalahan lainnya yaitu perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, kawasan wisata, serta fasilitas umum lainnya di Kota Bukittinggi perlu untuk disediakan dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Kebijakan perlindungan dan keberpihakan pemerintah Kota Bukittinggi terhadap anak berkebutuhan khusus dapat diwujudkan melalui kebijakan fasilitasi peningkatan jumlah dan peran Lembaga Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus (LPABK) serta fasilitasi terhadap penyediaan sarana perlindungan dan edukasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada fasilitas umum di Kota Bukittinggi.

3.1.4. Permasalahan Kemiskinan

Pemerintah kota Bukittinggi secara umum telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan daerah Kota Bukittinggi dari 6,49 persen tahun 2010 menjadi 5,35 persen tahun 2017. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional namun permasalahan penurunan tingkat kemiskinan ini tetap menjadi prioritas pengentasan Kota Bukittinggi secara jangka panjang.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi harus didukung dengan data kemiskinan dan rumah tangga sasaran yang akurat dan memadai.Permasalahan lainnya adalah meningkatnya tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh urbanisasi ke Kota Bukittinggi yang menetap dan berpindah-pindah pada kawasan-kawasan kumuh di Kota Bukittinggi sehingga sulit untuk mendata dan sulit untuk dijangkau oleh program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Bukittinggi.

3.1.5. Permasalahan Peningkatan Perekonomian Daerah

Prasarana penting mendukung perekonomian daerah Kota Bukittinggi adalah perdagangan dan jasa.Salah satunya adalah pengembangan pasar.Kebutuhan pasar yang representatif menjadi sangat penting sehingga mampu mendukung pertumbuhan

pedagang, meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan ketersediaan areal perparkiran, baik untuk pedagang ataupun pembeli.

Pada saat ini perkembangan kota terutama di wilayah pasar masih terkendala oleh minimnya fasilitas gedung parkir sehingga menggunakan badan jalan, terutama Pasar Atas yang sedang dibangun pasca kebakaran yang terjadi akhir tahun 2017 yang lalu. Kondisi ini membuat wajah kota menjadi tidak rapi dan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi perkotaan. Rencana revitalisasi pasar Bawah sebagai pasar basah yang dapat menampung kebutuhan akan pelayanan pasar tradisional bagi masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya menjadi mendesak untuk direalisir berikut dengan pembangunan areal perparkiran yang memadai, serta penyediaan pertokoan dan areal perdagangan sesuai kebutuhan pedagang ataupun pembeli.

Kota Bukittinggi sudah lama dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ekonomi Kota.Hanya saja pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan permasalahan mengenai belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan potensi unggulan daerah. Hal ini perlu diatasi melalui pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Aktivitas ekonomi Bukittinggi didukung oleh UKM dan

peranannya terlihat dari struktur PDRB Kota Bukittinggi.UKM di Bukittinggi terus berkembang dan terbuka, sehingga menjadi magnitude untuk berusaha bagi urban. Implikasinya pengangguran kota terus berkembang sehingga mampu menyerap angkatan kerja. Selain itu UKM juga dinilai tahan dalam menghadapi goncangan perekonomian, karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan bank dan lebih banyak menggunakan input lokal.

Permasalahan yang dihadapi UKM di Kota Bukittinggi pada dasarnya sama dengan permasalahan umum yang dihadapi, yakni permasalahan peningkatan kualitas produk, *packaging*, manajemen usaha pelaku UKM dan pola pemasaran. Penggunaan teknologi produksi masih terbatas karena spesifik masing-masing produk dan bahkan pelaku usaha.Pengembangannya membutuhkan intervensi pemerintah, berikut fasilitasi dan motivasi untuk memanfaatkannya.

Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UKM. Selain itu masalah yang masih mendasar lainnya adalah manajemen dalam pengelolaan keuangan.Permasalahan itu semua akhirnya bermuara pada kurang kompetitifnya produk lokal baik skala nasional maupun internasional.

3.1.6. Permasalahan Kepariwisataan

Sektor pariwisata merupakan sektor terpenting dalam perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pengembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kepariwisataan sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota. Perkembangan sektor pariwisata pada sistem ekonomi Kota Bukittinggi dapat dilihat dari perkembangan sektor-sektor pada PDRB yang terkait dengan aktifitas pariwisata yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi serta informasi dan komunikasi. Sektor-sektor PDRB pendukung kegiatan pariwisata mengalami pertumbuhan diatas 6% pertahun selama 10 tahun terakhir di Kota Bukittinggi. Bahkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang tumbuh paling tinggi pada PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebesar 9,28%.

Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi tidak lepas dari peningkatan daya tarik objek wisata dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata sesuai dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan daya tarik objek wisata dapat dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi fisik terhadap objek dan kawasan

wisata, pengembangan atraksi wisata pada objek/ kawasan wisata, penerapan teknologi dalam atraksi wisata serta kebijakan pengembangan objek/ kawasan wisata baru. Sedangkan untuk meningkatkan penyediaan sarana pendukung pariwisata diperlukan kebijakan penyediaan fasilitas umum pada kawasan wisata seperti air bersih, sarana peribadatan, tempat sampah, tempat duduk, listrik, fasilitas komunikasi, serta fasilitas-fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, kebijakan penyediaan prasarana wisata diperlukan terkait dengan fasilitasi ataupun penyediaan sarana akomodasi, belanja, dan peningkatan aksesibilitas pariwisata jalan, sarana transportasi masal, parkir, pedestrian, dan fasilitas informasi objek/ kawasan wisata. Kebijakan pembangunan jangka panjang sektor pariwisata lainnya adalah pengembangan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi untuk promosi dan meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata.

3.1.7. Permasalahan Penyediaan Infrastruktur Daerah

Pengembangan sarana pendukung perekonomian tentunya tidak bisa dilepaskan dari sistem transportasi meliputi jalan raya, alat transportasi terminal dan manajemen lalulintas.Kota Bukittinggi belum memiliki terminal angkutan barang, sementara kondisi terminal angkutan orang juga semakin berkurang karena

peluasan pertokoan. Kondisi ketiadaan terminal angkutan barang dan berkurangnya fungsi terminal angkutan penumpang berdampak kepada aktivitas perekonomian kota. Karena itu keberadaan terminal angkutan barang dan terminal angkutan penumpang yang representatif sangat mendesak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan terminal type A dan B dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi efektif semenjak tahun 2017. Hal ini perlu disikapi dengan baik, sehingga betul-betul mampu mendorong perekonomian kota dengan dukungan sarana dan prasarana yang representatif.

Sejalan dengan persoalan terminal, kebutuhan akan sarana perparkiran juga sangat mendesak untuk mendukung fungsi kota. Keberadaan gedung parkir yang ada sekarang belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perparkiran.Operasional gedung parkir yang ada juga belum maksimal, sementara perparkiran liar yang menggunakan badan jalan juga menjadi persoalan yang masih sulit diatasi, terutama pada puncak keramaian kunjungan ke Bukittinggi.

3.1.8. Permasalahan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi untuk Mewujudkan Kota Bukittinggi Sebagai Tempat Permukiman, Pariwisata, Pusat Perdagangan dan Jasa yang Aman dan Nyaman Berbasis Mitigasi Bencana serta Memperhatikan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, telah disusun penggunaan ruang Kota Bukittinggi yang didasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penyediaan dan menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau sesuai pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi tantangan pemerintah Kota Bukittinggi kedepan. Selain itu penataan jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan drainase perlu dikelola melalui pemanfaatan ruang sesuai ketentuan RTRW Kota Bukittinggi.

3.1.9. PermasalahanLingkungan Hidup

Proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong gagasan pembangunan yang berbasiskan lingkungan hidupyang menjadi perhatian hingga taraf internasional.Penyusunan perubahan RPJPD Kota Bukittinggi

Tahun 2005-2025 dilakukan dengan mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan telaahan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi sangat penting agar daya dukung alam dapat dipertahankan dalam tajuk pembangunan ramah lingkungan.

Secara umum kondisi lingkungan masih tergolong baik, terutama kualitas udara. Namun kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi sebagai drainase. Sementara itu fungsi-fungsi drainase juga tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota. Permasalahan lingkungan hidup juga terkait kualitas sanitasi.Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berprilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa persoalan yang perlu diuraikan lebih mendalam atara lain adalah seperti berikut ini:

3.1.9.1. Permasalahan Persampahan

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota.Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga

berdaya guna. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh cukup membantu penyelesaian masalah persampahan untuk sementara, namun tidak dalam jangka panjang, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya tampung dan daya dukung TPA tersebut. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru karena pembangunan TPA di dalam Kota Bukittinggi tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Disamping itu, program 3 R (*reduce, reuse and recycle*) belum berjalan efektif, sehingga perlu lebih ditingkatkan dengan cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Permasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri.Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selain itu, permasalahan yang cukup menjadi perhatian pemerintah kota Bukittinggi adalah permasalahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Oleh karena kompleksnya permasalahan sampah dan limbah di Kota Bukittinggi, maka penanganannya perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

3.1.9.2. Permasalahan Air Bersih

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.Kebutuhan air minum di Kota Bukittinggi saat ini dilayani oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Sumber Air baku PDAM berasal dari Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkaring, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Bor Palolok dan Sumur Dangkal Kubang Putih.

Secara umum, distribusi air minum di Kota Bukittinggi menggunakan sistem gravitasi, namun setiap sumber air memiliki cara pendistribusian masing-masing hingga sampai ke daerah

pelayanan. Hingga saat ini wilayah pelayanan air minum hampir memenuhi keseluruhan wilayah perencanaan walaupun terdapat beberapa kelurahan yang belum terlayani pelayanan air minum oleh PDAM. Guna mendukung pendistribusian air, saat ini telah dibangun beberapa reservoar dengan total kapasitas sebesar 3.180 m^3. Namun karena keterbatasan produksi maka tidak semua reservoar tersebut berfungsi.Permasalahan penting lain terkait jaringan perpipaan di Bukittinggi yang sudah tua, sehingga tingkat efisiensinya menjadi rendah dengan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasinya semenjak tahun 2011 pada beberapa titik. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

3.1.9.3. Permasalahan Sanitasi Kota

Kondisi sanitasi Kota Bukittinggi belum didukung sarana dan prasarana yang memadai.Penanganan sanitasi perkotaan mestinya sudah mengarah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang komunal dan terpusat.Permasalahan yang dihadapi oleh

Bukittinggi adalah keterbatasan lahan untuk pembangunannya.Sampai saat ini di Bukittinggi belum ada IPAL komunal ataupun IPLT. Persoalan ini tentu akan sangat mengurangi daya dukung lingkungan kota. Pada tahap berikutnya ini akan menjadi persoalan lingkungan, munculnya kawasan kumuh dan persoalan lingkungan lainnya.

Sementara itu penanganan persoalan sanitasi telah menjadi target nasional untuk dituntaskan maksimal di tahun 2019. Dengan demikian penyelesaian masalah drainase di Bukittinggi perlu menjadi prioritas dalam rangka pencapaian *universal access*.

3.1.9.4. Permasalahan Genangan Air

Permasalahan genangan air sewaktu hujan menjadi sangat krusial dialami Bukittinggi. Permasalahan ini disebabkan kondisi drainase kota yang belum mampu menampung luapan air sewaktu hujan karena endapan sedimen, dimensi dan jaringan yang tidak memadai. Persoalan lain juga diakibatkan oleh volume air hujan akibat luapan dari wilayah luar kota.

Penyelesaian persoalan ini perlu dukungan manajemen drainase terkait dengan penataan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier beserta dukungan dimensinya.Yang paling mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah pengerukan sedimen untuk mendukung kelancaran aliran air. Sementara penyelesaian luapan air pada musim hujan dari luar kota perlu

dilakukan pembenahan drainase luar kota dan pengalihan aliran drainase hingga ke drainase primer. Persoalan terkait lainnya adalah pengawasan dan edukasi pada masyarakat kota, luar kota dan pengunjung untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase.

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan, dilakukan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggiyang didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini:

a) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
b) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap Daerah dan masyarakat;
d) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
e) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
f) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

3.2.1.Faktor Strategis

Faktor strategis adalah faktor yang dimiliki secara alamiah dan menonjol bilamana dibandingkan dengan arah lain. Dengan memanfaatkan secara optimal faktor strategis tersebut akan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Faktor strategis tersebut dapat berasal dari dalam Kota Bukittinggi sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal).

3.2.1.1. Faktor Internal

a. Transisi Demografi

Proses Transisi Demografi sudah terjadi cukup baik di Bukittinggi, termasuk di sebagian besar daerah lainnya. Transisi demografi ditandai dengan tercapainya penurunan angka kelahiran menjadi sekitar 3,4 per rumah tangga.Artinya beban keluarga yang melahirkan anak yang lebih kecil akan semakin ringan dibandingkan dengan angka kelahiran yang lebih tinggi, pada saat bersamaan angka kematian bayi juga sudah menunjukkan tendensi yang menurun. Dengan semakin membaiknya angka kematian bayi ini, maka usia harapan hidup sudah mencapai 68,5 tahun lelaki dan 72,5 untuk wanita (UNDP, 2004:121).

Komponen lainnya adalah semakin mudahnya masyarakat dalam memilih tempat tinggal melalui proses migrasi dari dan ke kota Bukittinggi. Unsur yang terakhir ini lebih terlihat semakin banyaknya warga Bukittinggi, khususnya angkatan muda untuk mencari daerah lain. Dan dalam jangka panjang terjadi jumlah penduduk yang stabil.

Jendela demografi dimaksudkan bahwa generasi yang lahir saat ini nantinya pada tahun 2025 akan menjadi sumberdaya yang akan mengisi pembangunan. Artinya, dalam proses transisi kependudukan sebaiknya pilihan dilakukan merubah cara pandang keluarga mengarah kepada memilih menghasilkan generasi yang berkualitas dan beraqidah lebih penting dari menghasilkan jumlah anak yang sulit ditingkatkan kualitasnya.

Proses transisi demografi akan menghasilkan beban ketergantungan rumah tangga menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penduduk usia produktif.Ketika jumlah usia produktif semakin banyak, persoalan kemudian adalah bagaimana kita mampu menggiring agar produktifitas mereka dapat ditingkatkan.

Hasil perhitungan secara nasional (Morteaningsih, 2005) memperlihatkan bahwa jendela demografi, ditandai dengan kesempatan usia produktif untuk menghasilkan produktivitas tertinggi akan terjadi pada periode pembangunan 2015 sampai 2020. Keadaan tersebut akan terjadi bilamana proses pembangunan Kota Bukittinggi dapat mempersiapkan generasi yang akan datang dengan baik. Mulai dari sekaranglah saatnya hal itu sebaiknya dilakukan.

b. Daerah Tujuan Wisata Strategis

Mengingat Bukittinggi dan alam sekitarnya diberkahi oleh Allah Yang Maha Kuasa keindahan dan budaya, maka sumber daya alam dan manusia ini dianggap sebagai faktor strategis yang perlu dikembangkan. Dalam perjalanannya, daerah tujuan wisata akan terjadi secara diversifikasi, dan unifikasi antara Bukittinggi dengan daerah tujuan wisata lainnya dianggap sebagai faktor yang paling strategis. Saat bersamaan keberadaan fasilitas pelayanan, infrastruktur perlu disediakan sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan fasilitas yang sesuai dengan standar pelayanan internasional.

c. Bakat Kewirausahaan (*Enterpreunership*)

Mengingat Bukittinggi menjadi salah satu kota pusat industri kecil dan perdagangan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, pembangunan prasarana dan sarana pasar seharusnya diarahkan kepada penyediaan pusat pelayanan pasar yang juga bertaraf internasional.

Salah satu upaya yang paling strategis dilakukan dalam jangka panjang adalah menjadikan Kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat perdagangan wilayah Sumatera yang memfokuskan diri pada produk kerajinan dan usaha kecil dan menengah.

Produk pertanian, sumberdaya alam dan produk lainnya yang dihasilkan di wilayah Sumatera seharusnya mampu dikemas dalam jaringan perdagangan. Mengingat pengalaman Kota Bukittinggi masa yang lalu, maka saatnya Kota Bukittinggi mengambil faktor strategis ini dengan bersiap-siap menjadi sebuah kota yang menyediakan pusat perdagangan wilayah Sumatera.

d. Semakin Mantapnya Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2001 makin akan semakin mantap. Hal ini terjadi karena adanya revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

Berbekal pengalaman yang semakin banyak serta berbagai pelatihan yang dilakukan, maka kualitas aparatur daerah secara bertahap akan terus pula meningkat. Kesemuanya ini akan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah sehingga peranan pemerintah daerah akan dapat lebih dioptimalkan. Kondisi ini merupakan faktor strategis internal yang juga sangat penting untuk mendorong proses pembangunan Kota Bukittinggi.

3.2.1.2. Faktor Eksternal

a. Bandara Internasional Minangkabau

Keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas Kereta Api Bandara, tentunya akan sangat mendorong peningkatan angkutan udara dari dan ke Kota Padang, tidak hanya untuk penerbangan domestik, tetapi juga dari mancanegara.

Adapun fasilitas angkutan udara yang lebih baik tersebut tentunya akan membawa pengaruh positif yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata di Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kegiatan perhubungan udara yang selanjutnya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

b. Rencana Pelebaran Jalan Padang – Pekanbaru

Mulai tahun 2005, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah mulai melakukan pelebaran jalan raya Padang-Pekanbaru melewati Kota Bukittinggi. Sejalan dengan kegiatan ini dilakukan pula pembangunan jembatan layang *(fly-over)* kelok sembilan yang telah diresmikan pada tahun 2014 yang memudahkan dan meningkatkan intensitas mobilitas perdagangan dan jasa serta jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari Provinsi Riau.

Kegiatan ini merupakan faktor strategis eksternal yang cukup penting artinya bagi pengembangan Kota Bukittinggi sebagai pusat wisata dan perdagangan regional di masa depan.

Ini berarti bahwa perkembangan fasilitas perhubungan yang ada akan dapat dijadikan jendela untuk masuknya berbagai wisatawan ke Bukittinggi, baik domestik maupun mancanegara, arus muat barang, kendaraan dan manusia.

Perkembangan ini perlu ditindaklanjuti dengan apa yang perlu dikerjakan oleh Bukittinggi. Keinginan untuk berkembang sebagai kota sentra perdagangan wilayah Sumatera Tengah dan pariwisata adalah sesuatu yang sangat logis diwujudkan di Bukittinggi. Sehingga visinya kedepan adalah memanfaatkan kesempatan *window opportunity* ini.

c. Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api

Kepastian rencana reaktivasi jalur kereta api di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mana salah satu jalurnya melewati Kota Bukittinggi tentunya akan membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan Kota Bukittinggi dari berbagai aspek seperti dari sisi perekonomian, kesehatan, pendidikan serta keamanan, ketertiban dan lain-lain. Dengan aktifnya jalur kereta api ini tentunya arus barang dan orang dari dan ke Kota Bukittinggi akan semakin meningkat.

3.2.2. Penetapan Isu Strategis

Dengan mempedomani permasalahan pembangunan dan faktor-faktor strategis yang ada di Kota Bukittinggi maka didapatkan beberapa isu strategis yang harus segera ditanggapi. Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Perubahan RPJPD karena menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittingi sampai dengan berakhirnya periode RPJPD pada Tahun 2025.Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dimaksud harus segera ditanggapi dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isuyangbersifatstrategisKota Bukittinggi dikelompokkan antara lain:

1. Peningkatan PengamalanAgama dan Pengamalan Kearifan Lokal
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5. Pengembangan Kepariwisataan
6. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan
7. Peningkatan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
8. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Analisis terhadap isu strategis yang ditetapkan akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengamalan Agama dan Kearifan Lokal;

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab, meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat.

Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negatif yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta

masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai.*Falsafah ini telah mampu mengangkat derjat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi.Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi.Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama,* reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa

berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua,* reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia.

Selanjutnya, yang k*etiga,* reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *goodgovernance* dan *clean gevernment.* Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya.

Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang dibuat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu :

a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
e. Perlunya semua *stakeholder* untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan masyarakat.

f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ditinjau dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil dan berada diatas rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka IPM Kota Bukittinggi berada pada urutan tertinggi kedua setelah Kota Padang.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang Kota Bukittinggi yang dibangun sejalan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. Peningkatan pembangunan daerah yang tidak sejalan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan berdampak kepada peningkatan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang akan memberikan efek penggandaan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mampu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi sehingga dapatmempertahankan predikat yang sejak lama dikenal sebagai kota pendidikan dan kota yang berbudaya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya diukur dengan pengeluaran perkapita masyarakat, peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang diukur melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui peningkatan angka harapan hidup masyarakat Kota Bukittinggi.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi

semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah .

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan perekonomian daerah yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi individu dan msyarakat berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Percepatan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan amanah dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs*)* akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai.

Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi. Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4)

meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

Disamping isu strategis diatas, maka tak kalah pentingnya yang harus menjadi pekerjaan yang berat adalah Pengalihan Kewenangan Urusan Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkuren). Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan :

a. Pengelolaan pendidikan menengah;
b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;

j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan

k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

5. Pengembangan Kepariwisataan

Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi paling besar pada PAD Kota Bukittinggi dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sektor-sektor pada PDRB Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata. Oleh karena itu perkembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kepariwisataan sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota.

Sebagai sektor utama dan dominan dalam pengembangan perekonomian daerah Kota Bukittinggi, sektor pariwisata menjadi isu strategis pengembangan Kota Bukittinggi.Pengembangan daya tarik objek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata menjadi prioritas pengembangan pariwisata kedepan.

Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi secara jangka panjang diarahkan kepada pengembangan pariwisata yang berbudaya.Melalui konsep pariwisata yang berbudaya, Kota Bukittinggi dapat mengembangan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi bagian atraksi wisata serta melindungi kebudayaan

daerah dari masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya daerah Kota Bukittinggi.

6. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representatif. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota

menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata. .

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

7. Peningkatan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Pesatnya perkembangan Kota Bukittinggi berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan ruang bagi peruntukan infrastruktur dan kegiatan perekonomian. Rencana Tata Ruang

dan Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi telah mengatur peruntukan ruang Kota Bukittinggi untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan Kota Bukittinggi serta mengendalikan angka alih fungsi lahan Kota Bukittinggi.

Keberlangsungan sumber daya alam secara jangka panjang harus tetap dipertahankan untuk menyediakan lingkungan yang sehat untuk generasi berikutnya dan menjaga Kota Bukittinggi dari ancaman bencana alam.Namun demikian, menjaga keberlangsungan sumber daya alam juga tidak menghalangi perkembangan daerah.Rencana tata ruang wilayah menyediakan batasan-batasan terhadap pengembangan infrastruktur tanpa menghambat perkembangannya.

8. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan (*Brundtland Report* dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep *green city* juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kota BukittinggiTahun 2005-2025 memuat kondisi umum, visi, misi serta arah pembangunan Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun. Oleh karena itu substansi materi RPJPD ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga member keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD).

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 telah dilaksanakan dalam tiga periode jangka menengah. Ketiga Periode tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2005, Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2010, serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017. RPJMD juga memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota Bukittinggi serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJMD selanjutnya dijabarkan kembali kedalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Perangkat Daerah, pemantauan dan supervise realisasi pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjangdaerah.

Berdasarkan pembahasan pada setiap tahapan penyusunan perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 serta pelaksanaan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, tidak ada perubahan visipembangunanjangkapanjang Kota Bukittinggipada perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005 – 2025 yang telah dirumuskan yaitu ***"Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan"***.

Adil berarti berpihak dan berpegang pada kebenaran,

sejahtera berarti aman, makmur, dan terlepas dari segala macam gangguan yang merugikan, terdidik berarti memiliki pemahaman mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sehingga terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik dapat diartikan sebagai terwujudnya masyarakat yang berpegang pada kebenaran, aman, makmur dan memiliki pemahaman dan perilaku yang mencerminkan akhlak dan kecerdasan pikiran yang tinggi.

Selanjutnya kota yang maju dan berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai kota yang memiliki sarana dan prasarana perkotaan modern dan akomodir terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, namun tetap mempertahankan kelestarian alam dan sesuai konsep pembangunan berkelanjutan.

4.2. Misi

Merupakan dokumen rencana resmi daerah yang disusun untuk memberikan arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Penetapan misi pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota BukittinggiTahun 2005-2025 ini telah melalui pembahasan pada setiap tahapan

penyusunan dan telah dianalisis dampak lingkungannya melalui seluruh tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka ditetapkan misi pembangunan jangka panjang pada perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025. Tidak ada perubahan pada misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi, sebagaimana yang ada pada dokumen awal sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik , berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera; dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan.

Sebagai penjabaran dari Misi dan untuk memberikan arahan dalam menetapkan Sasaran, maka ditetapkan 5 Tujuan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Bukittinggi Tahun 2005-2025, sebagaiberikut :

1. Meningkatnya Layanan Pendidikan Kota Bukittinggi Berbasis Aqidah, dengan Indikator Tujuan Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum berkarakter;
2. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya manusia Kota Bukittinggi, yang dapat diukur dengan Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia;
3. meningkatnya Pembangunan Perkotaan yang berkualitas, yang dapat diukur dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi;
4. meningkatnya sarana prasarana perkotaan secara terpadu berwawasan Lingkungan, dengan indicator tujuan Persentase Sarana Prasarana perkotaan berwawasan Lingkungan; dan meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025dan implementasinya pada 3 (tiga) tahapan pembangunan jangka menengah yang telah dilaksanakan maka disajikan pentahapan visi dan misi pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 padatabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Pentahapan Visi dan Misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025

<table>
<tr><th colspan="2">RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021</th><th colspan="2">Tahapan Pembangunan Jangka Menengah</th></tr>
<tr><th>Visi</th><th>Misi</th><th>Visi</th><th>Misi</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan</td><td rowspan="4">1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik , berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam</td><td colspan="2">Tahap 1 (Tahun 2006-2010)</td></tr>
<tr><td>Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah (jasa dan perdagangan, kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang dijiwai oleh Agama dan Adat, Syarak Mangato Adaik Mamakai</td><td>1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradat berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung potensi unggulan kota;
4. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota;
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan tercapainya tujuan pemberian otonomi daerah tersebut berupa pemberdayaan daerah, mandiri dan demokratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tahap 2 (Tahun 2011-2015)</td></tr>
<tr><td>Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat Dan Berekonomi Mapan Dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama Dan Adat</td><td>1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government;
2. Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan pendidikan;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan;</td></tr>
</table>

	rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera; 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan		4. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan dan jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan).
		Tahap 3 (Tahun 2016-2021)	
		Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan , perdagangan dan Jasa berlandaskan nilai agama dan budaya	1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat). 2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan. 3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang, ditetapkan arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi untuk periode 2006-2025. Perumusan arah pembangunan jangka panjang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menemukenali persoalan dan fakta yang jelas untuk kemudian dirumuskan alternatif pemecahan dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.Memperhatikan kondisi umum daerah, dan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis serta visi misi jangka panjang Kota Bukittinggi sebagaimana diuraikan terdahulu, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi periode 2006-2025 yang mana pada saat ini tersisa lebih kurang 7 tahun lagi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam kehidupan Masyarakat

   Merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa sebagaimana dinyatakan pada misi I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025. Hal ini penting dilaksanakan guna memantapkan pengamalan budaya yang berlandaskan pada agama islam

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

   Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya, dan beradat berdasarkan iman dan takwa sebagaimana misi jangka panjang pertama, maka dirumuskan arah kebijakan jangka panjang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat serta penerapan adat dan agama yang dilakukan melalui penguatan peran lembaga adat dan agama di Kota Bukittinggi.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih

   Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pemantapan sistem pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi Ramah Lingkungan dan Pemerataan Pendapatan

   Program-program penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan efektif jika diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan ramah lingkungan, disertai dengan penurunan kesenjangan pendapatan.

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berwawasan Lingkungan dan Budaya Lokal

   Penyediaan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan menjadi perhatian dan arah kebijakan jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mewujudkan kota yang nyaman, aman, ramah lingkungan, serta akomodir terhadap kebutuhan dan perkembangan daerah.

6. Penataan Kota dan Pengaturan tata Ruang Wilayah Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

   Pelaksanaan penataan Kota dan pengaturan tata ruang wilayah menjadi arah kebijakan jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi, berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.

7. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

   Arah kebijakanpeningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana danperubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangirisiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah danmasyarakat terhadap bencana,

serta memperkuat kapasitasmitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

8. Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya dan Ramah Lingkungan

   Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya dan ramah lingkungan merupakan suatu strategi jangka panjang dalam rangka mempertahankan Kota Bukittinggi sebagai Kota tujuan wisata yang berlandaskan kearifan lokal kebudayaan daerah Kota Bukittinggi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup

5.2. Tahapan Pembangunan Daerah dan Skala Prioritas

Untuk dapat mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunanjangka panjang Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 secara bertahap, jelas dan konkrit, diperlukan pentahapan pembangunan daerah dan skala prioritas untuk masing-masing periode lima tahunan.

Tahapan prioritas pembangunan tersebut berisikan sasaran dan capaian yang diharapkan dapat diwujudkan pada masing-masing tahap pembangunan. Oleh karena itu prioritas pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan akan berbeda-beda, namun harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025

No	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJMD KE 1 2005-2010	RPJMD KE 2 2010-2015	RPJMD KE 3 2016-2021	RPJMD KE 4 2021-2025
1	Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas	-	Penerapan ajaran agama dan adat pada setiap aspek kehidupan	Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Mewujudkan *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* dalam kehidupan masyarakat
2	Mewujudkan pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah	-	-	-	
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, dan Peningkatan pemerataan dan derajat kesehatan	Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas
5	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu	Pengembangan usaha Perdagangan dan Jasa	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan ekonomi kerakyatan (KUKM)	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan

					pemerataan pendapatan
6	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata	Pengembangan kepariwisataan	-	Pengembangan Pariwisata	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata yang berbudaya dan ramah lingkungan
7	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan	Sarana Prasarana kota, Pemukiman dan perumahan	Peningkatan kuantitas & kualitas infrastruktur	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan berwawasan lingkungan dan Budaya Lokal
8	Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Seni	-	-	-	
9	Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang Wilayah	Tata Ruang	-	-	Penataan dan Pengaturan tata ruang Wilayah Berbasis daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup
10	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelestarian lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas lingkungan Hidup

Pentahapan prioritas pembangunan tersebut nantinya akan dirinci lebih lanjut dalam strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah pada masing-masing RPJMD sehingga akan terlihat dengan jelas pencapaian pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi 2005-2025.

5.3. Sasaran Pokok

Berdasarkan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebagaimana subbab 5.1 diatas maka dirumuskan sasaran pokokbeserta indikator sasaran dan target capaian perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025. Adapun sasaran pokok tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerapan pendidikan berkarakter di Kota Bukittinggi.

   Untuk mengukur capaian sasaran ini digunakan indikator Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter, yang mana kondisi *eksisting*nya saat ini penerapan kurikulum pendidikan berkarakter belum dilaksanakan, dan ditargetkan pada akhir periode RPJPD pada Tahun 2025 adalah 10% sekolah telah menerapkan kurikulum pendidikan berkarakter
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sasaran ini dapat diukur menggunakan 2 Indikator yakni :Opini BPK dan Hasil Penilaian SAKIP. Kondisi Saat ini Opini BPK Untuk Kota Bukittinggi adalah WTP, sedangkan Indeks Sakip Kota Bukittinggi adalah B dan ditargetkan menjadi AA pada Akhir periode RPJPD tahun 2025

3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

   Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia yang berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik dengan Metode Terbaru dengan menggunakan 4 komponen yang di ukur yakni Angka Harapan Hidup (Tahun), Angka Melek huruf (%), Rata-rata lama sekolah (tahun) dan Daya beli (Rupiah Pengeluaran Riil per Kapita
4. Meningkatnya Pemerataan ekonomi

   Indikator yang digunakan antara lain adalah Indeks gini, Tingkat kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan

   Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
6. Pengembangan sektor pariwisata

   Indikator yang digunakan adalah jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal wisatawan dan jumlah event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah

7. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia yang ramah lingkungan

   Indikator yang digunakan adalah Pengakuan UNESCO terhadap Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia

8. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur kota yang ramah lingkungan

   Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaannya adalah dengan Penyediaan transportasi masal, persentase pemenuhan sarana prasarana Publik dan Pemerintahan, dan persentase pemenuhan sarana prasarana Perdagangan

9. Meningkatnya penyelenggaraan penataan Kota dan pengaturan tata ruang wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

   Indikator yang digunakan adalah Rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi

10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

    Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaanya adalah Penyediaan air minum layak, persentase kawasan kumuh dan persentase sanitasi layak

Tabel 5.2
PentahapanPencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025

No	Sasaran Pokok Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025	IndikatorSasaran Pokok Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025		Realisasi Capaian				
				RPJMD KE 1 2005-2010	RPJMD KE 2 2010-2015	RPJMD KE 3 2016-2021	Target RPJMD KE 4 2021-2025	
							Semula	Menjadi
1	Meningkatnya penerapan Pendidikan Karakter di Kota Bukittinggi	1	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter	-	-	-	0	10%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	2	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Hasil penilaian SAKIP	-	-	A	A	A
3	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	4	IPM	76.12	78.72	79.8	79.8	81.00
4	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	5	Indeks gini	0.41	0.34	0.30	0.30	0.28
		6	Tingkat kemiskinan	5.3	4.56	2.84	2.84	2.0
		7	Tingkat pengangguran terbuka	6.21	5.84	4.93	4.93	4.50
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang ramah lingkungan	8	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	5.4	6.19	6.50	6.50	6.60
6	Pengembangan Sektor pariwisata	9	Jumlah Kunjungan Wisatawan	326.410	460.910	588.245	588.245	654.751
		10	Rata – rata lama tinggal Wisatawan	1 hari	1.5 hari	3 hari	3 hari	4 hari
		11	Jumlah Event Pariwisata yang berbasis kebudayaan				0	5 event

			daerah					
7	Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia yang ramah lingkungan	12	Pengakuan UNESCO	-	-	-	Belum	Diakui
8	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kota yang ramah lingkungan	13	Penyediaan Transportasi Massal	-	-	-	Belum	Tersedia
		14	Persentase pemenuhan Sarana Publik dan Pemerintahan	-	-	-	-	100%
		15	Persentase pemenuhan Sarana Prasarana Perdagangan	-	-	-	-	100%
9	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang wilayah berbasis DDDT Lingkungan Hidup	16	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	55%	70%	70%	90%
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas LIngkungan Hidup	-	-	-	-	48.1
		17	Persentase Penyediaan air minum layak	60%	85%	100%	100%	100%
		18	Luas kawasan kumuh	30.60 Hektar	30.60 Hektar	0	0	0
		19	Persentase sanitasi layak	60%	85%	100%	100%	100%

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2005-2025	No	Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2005-2025	Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2005-2025		Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2005-2025	Arah Kebijakan Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025		Sasaran Pokok Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025		Indikator Sasaran Pokok Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2026	
terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan	1	Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa	1	Meningkatnya Layanan Pendidikan Kota Bukittinggi Berbasis Aqidah	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter	1	Mewujudkan Adat *Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya penerapan Pendidikan Karakter di Kota Bukittinggi	1	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter
	2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)	2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya manusia Kota Bukittinggi	Indeks Pembangunan Manusia	2	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	2	Indeks Integrasi pelayanan publik
										3	Indeks SAKIP
						3	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas	3	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	4	IPM
	3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan	3	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perkotaan yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi Ramah Lingkungan dan Pemerataan pendapatan	4	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	5	Indeks Gini
										6	Tingkat kemiskinan
										7	Tingkat pengangguran terbuka
								5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	8	Tingkat Pertumbuhan ekonomi
						5	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata yang	6	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam Perekonomian Kota	9	Jumlah Kunjungan Wisatawan
										10	Kontribusi sektor Pariwisata

							berbudaya dan ramah lingkungan		Bukittinggi		terhadap PDRB
										11	Jumlah Event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah
								7	Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia	12	Pengakuan UNESCO
	4	Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera	4	Meningkatnya Sarana Prasarana perkotaan secara terpadu berwawasan lingkungan	Persentase Sarana Prasarana perkotaan berwawasan lingkungan	6	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berwawasan lingkungan dan budaya lokal	8	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Modern	13	Peningkatan Akses Transportasi Massal
										14	Peningkatan kualitas Sarana Publik dan Pemerintahan
										15	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perdagangan
	5	Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan	5	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7	Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang Wilayah berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup	9	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang wilayah	16	Persentase penataan ruang dan wilayah kota berdasarkan RTRW
						8	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Persentase Penyediaan air minum layak
										18	Persentase kawasan kumuh
										19	Persentase sanitasi layak

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun kedepan.

RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2005-2025 ini juga menjadi Arah dan pedoman didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode tersebut.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah "terwujudnya masyarakatadil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan" dapat diwujudkan jika didukung oleh : (i) komitmen yang kuat dari kepemimpinan daerah dan demokratis; (ii) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (iii) ketatapemerintahan yang baik (*good governance*); (iv) keberpihakan kepada rakyat; dan (v) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi dalam rangka mewujudkan pembangunan kota Bukittinggi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

H. M. RAMLAN NURMATIAS